

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS)

**(Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
Desa Kedungrejo Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Oleh:

YUNA RIZKY OCTANIA

145030101111050



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTTO

Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan itu Ada Kemudahan

Sesungguhnya Bersama Kesulitan itu Ada Kemudahan

- QS Al Insyirah 5-6



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemberdayaan Perempuan melalui Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Desa Kedungrejo Kabupaten Jombang)

Disusun oleh : Yuna Rizky Octania

NIM : 145030101111050

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 15 Mei 2018

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP.19690524 200212 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO.20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 11 April 2018

The block contains a handwritten signature in black ink and an official stamp of Universitas Brawijaya. The stamp is circular with the university's name and logo, and includes a QR code and the number 36AFF124639615.

Nama : Yuna Rizky Octania
NIM : 14503010111050

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 6 Juli 2018
Waktu : 10.00 - 11.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Yuna Rizky Octania
Judul : Pemberdayaan Perempuan melalui Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Desa Kedungrejo Kabupaten Jombang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

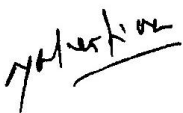
Ketua

Anggota


Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP.19690524 200212 2 002


Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota


Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP
NIP. 19840713 2015 04 1 004

RINGKASAN

Yuna Rizky Octania, 2018, **“Pemberdayaan Perempuan melalui Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Desa Kedungrejo Kabupaten Jombang)”**, Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si sebagai Dosen Pembimbing. Hal 110+xvi

Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) merupakan program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan yang berupaya mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat dengan perempuan sebagai penggerakannya. Salah satu daerah yang menerapkan program P2WKSS yakni Desa Kedungrejo yang dibina oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dinas terkait.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana pemberdayaan perempuan melalui Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Kedungrejo, Kabupaten Jombang serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Kedungrejo, Kabupaten Jombang sehingga diketahui permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang paling tepat untuk permasalahan ini karena dapat memberikan penggambaran keadaan yang mendalam tentang situasi yang terjadi pada pemberdayaan program P2WKSS tersebut. Lokasi Penelitian berada di Kabupaten Jombang dan situs penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Desa Kedungrejo. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis Miles, Huberman dan Saldana (2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tahapan-tahapan dalam penerapan program P2WKSS yang pelaksanaannya telah berjalan dengan baik. Faktor pendukung terlaksananya program P2WKSS di Desa Kedungrejo yakni tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan bantuan-bantuan dari tim pembina P2WKSS. Sedangkan faktor penghambatnya yakni dana dan waktu pembinaan, sumber daya manusia, dan belum adanya kerjasama dengan pihak swasta.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Wanita, Program P2WKSS

SUMMARY

Yuna Rizky Octania, 2018, **“Empowering Women through Program for Increasing the Role of Women to a Healthy and Prosperous Family (Study at Women's Empowerment and Child Protection and Kedungrejo Village, Jombang District)”**, Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si as a Lecturer. Page 110+xvi

The Program for Increasing the Role of Women to a Healthy and Prosperous Family (P2WKSS) is a program to increase the role of women in development that seeks to develop human resources, natural resources and environment to realize and develop healthy, prosperous and happy families in the framework of community development with women as their drivers. One of the areas that implement P2WKSS program is Kedungrejo Village which is maintained by the Office of Women Empowerment and Child Protection and related offices.

This research is intended to analyze how women's empowerment through the Program of Increasing the Role of Women to Healthy and Prosperous Family (P2WKSS) in Kedungrejo Village, Jombang Regency and identifying supporting factors as well as obstacles in the implementation of women's empowerment through the Program of Increasing the Role of Women Toward a Healthy and Prosperous Family (P2WKSS) in Kedungrejo village, Jombang regency so that the problem is known.

The research method used is descriptive research type with qualitative approach. Descriptive qualitative research method is the most appropriate method for this problem because it can give a depth of depth about the situation that happened to the empowerment of P2WKSS program. Research Sites are located in Jombang District and research sites in the Department of Women Empowerment and Child and Village Protection Kedungrejo.this research is using data analysis by Miles, Huberman and Saldana (2014) analysis.

The results show that there are stages in the implementation of the P2WKSS program whose implementation has been running well. Factors supporting the implementation of P2WKSS program in Kedungrejo Village are the availability of facilities, facilities and infrastructure, human resources, and assistance from the P2WKSS development team. While the inhibiting factors are funds and time of coaching, human resources, and the lack of cooperation with private parties.

Keywords: Empowerment, Women, P2WKSS Program

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Karunia, Ridho dan Hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Perempuan melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Desa Kedungrejo, Kabupaten Jombang)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih banyak kepada pihak-pihak terkait diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya.
3. Pak Fadillah Amin, Dr., M.AP., Ph.D, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
4. Bu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

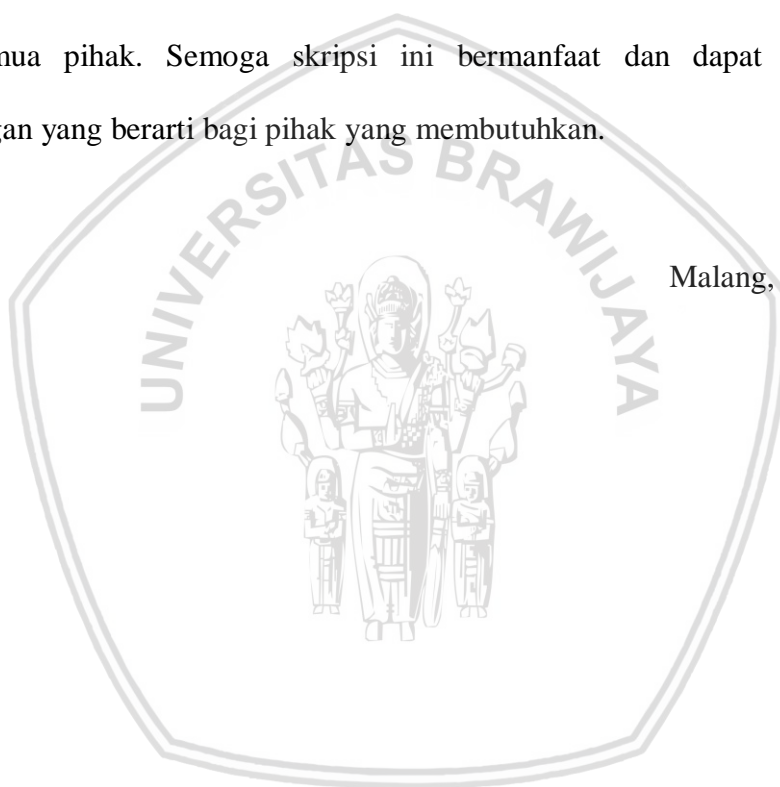
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah bersedia memberikan ilmu selama proses belajar di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
6. Seluruh Staff dan Karyawan pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya yang telah membantu proses awal hingga akhir.
7. Bapak Drs. Yustinus Haris EP selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan yang telah memberikan data dan informasi selama penelitian
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian disana.
9. Bapak M. Nurrudin SP selaku Kepala Desa Kedungrejo, Kabupaten Jombang yang telah memberikan data dan informasi selama penelitian.
10. Bu Iza dan Bu Suyati selaku warga binaan P2WKSS di Desa Kedungrejo, Kabupaten Jombang yang telah memberikan data dan informasi selama penelitian.
11. Kedua Orang Tua saya, Bapak Hud Sudarto dan Ibu Siti Maemunah yang selalu memberikan banyak dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
12. Kakak-kakak dan Adik-adik saya yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman kuliah angkatan 2014 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya yang telah memberikan dukungan dan semangat.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, sebagai proses pembelajaran yang terus menerus, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 30 Mei 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Pembangunan	
1. Pengertian Administrasi Pembangunan	14
2. Perempuan dalam Pembangunan (WID).....	15
3. Perempuan dan Pembangunan (WAD)	16
4. Pendekatan Pemberdayaan atau Gender dan Pembangunan (GAD).....	17
B. Pemberdayaan Masyarakat	
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	19
2. Tujuan Pemberdayaan.....	20
3. Tahapan-Tahapan Kegiatan Pemberdayaan.....	22
4. Aktor dalam Pemberdayaan	24
C. Pemberdayaan Perempuan	
1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan	25
2. Tujuan Pemberdayaan Perempuan.....	27
D. Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera	
1. Pengertian	28
2. Dasar Hukum	29
3. Tujuan	31
4. Kebijakan	32
5. Ruang Lingkup	33
6. Indikator-indikator P2WKSS.....	35

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	37
	B. Fokus Penelitian	38
	C. Lokasi dan Situs Penelitian	39
	D. Jenis dan Sumber Data	40
	E. Teknik Pengumpulan Data	42
	F. Instrumen Penelitian	43
	G. Analisis Data	45
 BAB IV	 HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian	
	1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang	
	a. Sejarah Kabupaten Jombang	49
	b. Geografis	51
	c. Iklim	51
	d. Topografi	52
	e. Pembagian Wilayah Administratif	53
	f. Penduduk	54
	2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	a. Susunan Organisasi	55
	b. Tugas Pokok dan Fungsi	56
	3. Gambaran Umum Desa Kedungrejo Kabupaten Jombang	
	a. Letak Geografis Desa	57
	b. Luas Wilayah dan Penggunaan Tanah	58
	c. Pembagian Wilayah	58
	d. Jumlah Penduduk	58
	B. Penyajian Data	
	1. Pemberdayaan Perempuan dalam Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Kedungrejo Kabupaten Jombang	
	a. Tahap-Tahap Pemberdayaan Perempuan melalui Program P2WKSS di Desa Kedungrejo	59
	b. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Program P2WKSS di Desa Kedungrejo	72
	2. Faktor Pendukung dan Penghambat	
	a. Faktor Pendukung	77
	b. Faktor Penghambat	78
	C. Analisis Data	
	1. Pemberdayaan Perempuan dalam Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Kedungrejo Kabupaten Jombang	
	a. Tahap-Tahap Pemberdayaan Perempuan melalui Program P2WKSS di Desa Kedungrejo	80
	b. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Program	

	P2WKSS di Desa Kedungrejo.....	91
	2. Faktor Pendukung dan Penghambat	
	a. Faktor Pendukung	94
	b. Faktor Penghambat	96
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	98
	B. Saran.....	100
	DAFTAR PUSTAKA	101
	LAMPIRAN.....	103



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 2016.....	5
2. Lokasi Binaan P2WKSS	7
3. Peran Tiga Aktor Pemberdayaan Masyarakat	24
4. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang	54
5. Luas Tanah Menurut Penggunaan.....	58
6. Data Sarana Kesehatan.....	63
7. Jumlah Ibu Hamil yang Memeriksa Kehamilannya ke Petugas Kesehatan	65
8. Prosentase rata-rata jumlah balita ditimbang Tahun 2017	66
9. Prosentase rata-rata jumlah balita yang naik timbangannya Tahun 2017.....	66
10. Jumlah bayi yang mendapat ASI Eksklusif Tahun 2017	66
11. Jumlah Penduduk Pra Lansia dan Lansia di Desa Kedungrejo.....	68
12. Jenis kegiatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan gizi Buruk.....	69
13. Data UKBM dalam mendukung pengembangan desa Siaga.....	70
14. Kondisi pengembangan Desa Siaga Aktif.....	70
15. Daftar Tim Pembina P2WKSS Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Desa	72
16. Nama-nama Kader Binaan Program P2WKSS di Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Komponen Analisis Data Model Interaktif	48
2. Peta Administratif Kabupaten Jombang	53
3. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Dokumen Hasil Wawancara	103
2. Pedoman Wawancara	107
3. Surat Riset/ Penelitian	108
4. Curriculum Vitae	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan saat ini merupakan kegiatan yang gencar-gencarnya digalakkan oleh pemerintah. Menurut Riyadi dalam Mardikanto dan Soebianto (2015:3) pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat serta individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Definisi pembangunan tersebut selaras dengan pengertian Pembangunan Nasional pada UU No. 25 Tahun 2004 yaitu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan tersebut terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Untuk mencapai tujuan bernegara, pembangunan nasional hendaknya dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam pelaksanaannya sebagian besar dilakukan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya kesetaraan gender. Padahal bila dilihat dari jumlah penduduk perempuan di Indonesia, perempuan bisa menjadi potensi besar dalam sumber daya pembangunan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika tahun 2010, jumlah penduduk laki-laki Indonesia sebanyak 119.630.913 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 118.010.413 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari penduduk Indonesia yakni perempuan.

Namun, perempuan cenderung dikesampingkan peran dan keterlibatnya dalam proses pembangunan di segala bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena adanya anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan yang cukup dibandingkan laki-laki.

Terkait hal tersebut, perempuan dianggap mengalami ketidakberdayaan. Pada saat ini ketidakberdayaan menjadi masalah utama dalam pembangunan di berbagai bidang yang ditandai dengan kekurangan, kerentanan (mudah menjadi miskin), kemiskinan, keterisolasian dari informasi dan modal, keterbatasan sumber daya ekonomi, dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan pemberdayaan. Kondisi ketidakberdayaan juga berakibat pada tataran sosial, ekonomi, produktivitas, partisipasi, keterlibatan, dan kepercayaan. Perempuan yang mengalami ketidakberdayaan erat kaitannya dengan lima ketidakberuntungan yang diungkapkan oleh Chambers dalam Yansen (2013) yaitu (a) kemiskinan (*poverty*); (b) fisik yang lemah (*poverty*); (c) kerentanan (*vulnerability*); (d) keterisolasian (*isolation*) dan; (e) ketidakberdayaan (*powerlessness*). Kelima ketidakberuntungan yang diungkapkan Chamber tersebut biasa ditemukan dalam keseharian perempuan Indonesia yang dihadapkan pada situasi delematis. Perempuan Indonesia di satu sisi dituntut untuk dapat berperan di semua sektor dan di sisi lain tidak boleh melupakan kodratnya sebagai perempuan.

Di Indonesia biasanya perempuan yang berkarir dianggap melupakan tugas dan kewajibannya dalam melayani serta mengurus suami dan menjaga serta mengurus anak-anaknya. Adapula suami yang melarang istri berkarir karena merasa sanggup mencukupi kebutuhan keluarga kemudian suatu saat dihadapkan pada kondisi kelemahan fisik (jatuh sakit) atau meninggal yang menyebabkan rasio ketergantungan seorang perempuan terhadap suaminya sangat tinggi. Ketika hal tersebut terjadi maka terpaksa perempuan terpaksa mengambil alih peran kepala keluarga yang menuntut menjadi pencari nafkah tunggal tanpa memiliki kemampuan, pengalaman untuk mencari pekerjaan, membuka usaha sendiri, serta didukung dengan pendidikan yang rendah. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan sebagian besar dialami oleh perempuan.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Murdiansyah (2014) masalah kemiskinan menyangkut dengan kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan maka perlu adanya pengarusutamaan gender yang melibatkan peran perempuan dalam pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan perempuan tercantum dalam tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang harus dicapai. Tujuan MDGs tersebut antara lain menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan untuk semua, mendorong kesadaran gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS serta penyakit menular, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global.

Salah satu upaya dalam melibatkan peran perempuan dalam pembangunan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan. Menurut Parawansa (2006)

pemberdayaan perempuan adalah usaha perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya. Adanya pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi perempuan sehingga dapat menanggulangi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, membantu meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga dan lain sebagainya.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program pemberdayaan perempuan. Upaya pemerintah untuk memberdayakan perempuan yaitu melalui program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) yang merupakan program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) merupakan program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan yang berupaya mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat dengan perempuan sebagai penggerakannya. Sasaran Program P2WKSS yaitu perempuan dari keluarga Pra Sejahtera atau sangat miskin. Di Kabupaten Jombang sendiri angka kemiskinan cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data berikut:

Tabel 1 Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 2016

Kecamatan	Pra Sejahtera	Sejahtera			Jumlah
		KS I	PS + KS I	KS II - III+	
Bandar KDM	2.326	2.999	5.325	9.647	20.297
Perak	1.573	3.540	5.113	11.880	22.106
Gudo	1.280	3.345	4.625	12.709	21.959
Diwek	3.379	7.873	11.252	20.279	42.783
Ngoro	4.362	5.465	9.827	12.937	32.591
Mojowarno	5.419	4.620	10.039	18.230	38.308
Bareng	4.703	3.127	7.830	10.058	25.718
Wonosalam	3.641	2.367	6.008	4.394	16.410
Mojoagung	4.793	3.864	8.657	15.159	32.473
Sumobito	2.878	4.856	7.734	18.467	33.935
Jogoroto	2.826	4.537	7.363	13.058	27.784
Peterongan	1.967	3.808	5.775	14.806	26.356
Jombang	4.693	7.785	12.478	25.963	50.919
Megaluh	1.883	2.661	4.544	8.922	18.010
Tembelang	2.416	4.314	6.730	10.560	24.020
Kesamben	3.900	4.104	8.004	13.024	29.032
Kudu	2.136	1.276	3.412	7.590	14.414
Ngusikan	2.843	1.859	4.681	2.576	11.959
Ploso	3.086	3.018	6.104	7.117	19.325
Kabuh	6.773	1.693	8.466	5.662	22.594
Plandaan	4.544	2.772	7.316	6.271	20.903
Jumlah	71421	79883	151283	249309	551896

Sumber: jombangkab.bps.go.id

Tabel tersebut menunjukkan bahwa keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Jombang pada tahun 2016 mencapai 71421 dari 551890 penduduk. Banyaknya keluarga pra sejahtera di Kabupaten Jombang tersebut yang melandasi Kabupaten Jombang dipilih untuk menerapkan program P2WKSS. Program P2WKSS di Kabupaten Jombang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/97/415.10.3.4/2017 tentang Tim Pengelolaan Program Terpadu

Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, program P2WKSS berada di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan program P2WKSS, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh SKPD terkait. SKPD terkait yang membantu pelaksanaan program P2WKSS terdiri dari 13 sektor antara lain Kanwil Kemenag, Kanwil Hukum dan HAM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kominfo, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, BPPKB, Badan Ketahanan Pangan, Badan Narkotika Nasional (BNN), TP-PKK.

Program P2WKSS merupakan salah satu program pemberdayaan perempuan menggunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas keluarga. Penyelenggaraan program ini memiliki karakteristik yang menyeluruh dimana masyarakat terutama perempuan kelompok keluarga miskin mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesempatan aktif dalam program. Perempuan dibina dan diberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan edukasi pangan lokal, pelatihan tata boga, pelatihan daur ulang sampah, pelatihan menjahit dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa program terpadu P2WKSS sangat potensial untuk memberdayakan potensi perempuan dalam rangka peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.

Keutamaan lain program P2WKSS terlihat dari adanya keterlibatan secara penuh peran perempuan di dalamnya. Seperti yang kita ketahui bahwa secara kultural, perempuan terbiasa mengurus ekonomi rumah tangga, sehingga dia bisa dengan mudah mengelola keuangan itu dengan baik dan secara emosional

perempuan lebih dekat dengan anak-anaknya sehingga ketika perempuan memiliki penghasilan dia akan lebih mengutamakan kepentingan keluarganya terutama anaknya. Sehingga perempuan menjadi kunci utama kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan keutamaan Program P2WKSS diatas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang melaksanakan program tersebut setiap tahunnya. Program P2WKSS di Kabupaten Jombang telah dilaksanakan mulai tahun 2001. Dari 306 Desa di Kabupaten Jombang, yang telah di bina dalam Program P2WKSS yaitu 17 Desa. Berikut adalah data lokasi binaan Program P2WKSS di Kabupaten Jombang:

Tabel 2 Lokasi Binaan P2WKSS

NO	TAHUN	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1	2001	PERAK	GLAGAHAN	
2	2002	BARENG	KARANGAN	
3	2003	NGUSIKAN		
4	2004	PLANDAAN	TONDOWULAN	Harapan II
5	2005	PLOSO	JATIGEDONG	Tidak masuk nominasi
6	2006	TEMBELANG	BEDAHLAWAK	Tidak masuk nominasi
7	2007	GUDO	KREMBANGAN	Tidak masuk nominasi
8	2008	DIWEK	BALUNGBESUK	Nominasi Presentasi
9	2009	NGORO	JOMBOK	Harapan I
10	2010	GUDO	SEpanyul	Nominasi Presentasi
11	2011	JOMBANG	BANJARDOWO	Harapan I
12	2012	PLOSO	GEDONGOMBO	Tidak masuk nominasi
13	2013	KABUH	GENENGANJASEM	Tidak masuk nominasi
14	2014	PETERONGAN	TUGUSUMBERJO	Tidak masuk nominasi
15	2015	SUMOBITO	CURAHMALANG	Juara II
16	2016	NGORO	BADANG	Juara III
NO	TAHUN	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
17	2017	MEGALUH	KEDUNGREJO	Desa Binaan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Jombang telah mendapatkan berbagai penghargaan dari Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program P2WKSS di Kabupaten Jombang sudah berjalan dengan baik. Hingga saat ini program P2WKSS masih terus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

Pada Tahun 2017 desa yang mendapat giliran untuk dibina oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Desa Kedungrejo. Desa Kedungrejo merupakan desa miskin atau desa merah yang berada di Kecamatan Megaluh. Pendapatan keluarga masyarakat Desa Kedungrejo masih dianggap kurang, hal ini disebabkan masih kurangnya kemampuan dan kemauan warga dalam memanfaatkan potensi lokal desa. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Desa Kedungrejo dipilih untuk menjadi lokasi sasaran P2WKSS. Program P2WKSS di desa Kedungrejo dilaksanakan mulai pada bulan Februari. Selama dilaksanakan Program P2WKSS di desa Kedungrejo, masih terdapat kendala dalam penerapan program tersebut yaitu pada proses pemberdayaan terkadang terkendala akibat kader program P2WKSS disibukkan oleh pekerjaan masing-masing. Kendala tersebut disampaikan oleh Pak Haris selaku kepala seksi peningkatan kualitas hidup perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

“dalam penerapannya kendalanya mengumpulkan kader. Kader yang melakukan pembinaan kan jumlahnya 12 komponen. Masing-masing komponen tadi terdiri dari 3 kader. Jumlah keseluruhannya 36 kader. Kader P2WKSS sebagian besar adalah masyarakat yang bekerja, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang PNS, ada yang sibuk mengurus anak-anaknya” (wawancara tanggal 10 November 2017, pukul 10.16 WIB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang)

Selain kendala yang disampaikan diatas, kendala lainnya yaitu terbatasnya anggaran program P2WKSS sehingga pelaksanaan program tersebut belum terlaksana secara maksimal. Terbatasnya anggaran menyebabkan pelatihan yang diberikan hanya bisa dilakukan dua bulan sekali.

Tidak dapat dipungkiri disamping kendala-kendala yang ada dalam penerapan P2WKSS yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Jombang mampu mendapatkan berbagai penghargaan dalam Program P2WKSS. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Jombang melalui program P2WKSS. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Perempuan melalui Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Desa Kedungrejo Kabupaten Jombang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan perempuan dalam program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) di Desa Kedungrejo, Kabupaten Jombang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program peningkatan peranan wanita

menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) di Desa Kedungrejo, Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan perempuan dalam program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) di Desa Kedungrejo, Kabupaten Jombang
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) di Desa Kedungrejo, Kabupaten Jombang

D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya terdapat kontribusi yang dapat diterima semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun kontribusi yang ingin dicapai yaitu:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah sekaligus menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh.

- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan sebagai mampu memberikan sumbangan pemikiran dan beban kajian tentang kebijakan.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pemberdayaan perempuan serta keberlanjutan program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan gambaran masyarakat mengenai program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera serta untuk bahan masukan dalam mengetahui potensi yang dimiliki oleh perempuan untuk menangani masalah penanggulangan kemiskinan

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan mempermudah pemahaman untuk mendapatkan suatu susunan pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I ini terdiri dari lima sub bab. Pertama yaitu latar belakang berupa alasan yang mendasari penulis untuk menganalisis pemberdayaan perempuan melalui program pemberdayaan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera. Kedua yaitu rumusan masalah yang akan diteliti. Ketiga yaitu tujuan penelitian. Keempat yaitu manfaat penelitian. Kelima yaitu sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II menguraikan tentang teori-teori atau temuan ilmiah dari buku, jurnal, maupun hasil temuan terdahulu yang relevan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan untuk penanggulangan kemiskinan dalam mewujudkan pembangunan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB III ini menjelaskan mengenai langkah-langkah teknis dan praktis sehingga diperoleh tujuan penelitian. Pertama mengenai jenis penelitian yang merupakan jenis penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kedua mengenai fokus penelitian yang mengemukakan data yang di kumpulkan, di olah, dan di analisis. Ketiga mengenai lokasi dan situs penelitian yang menjadi tempat penelitian dilaksanakan. Keempat mengenai sumber data yang digunakan untuk penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Kelima mengenai teknik peengumpulan data, kemudian instrumen penelitian berisikan tentang pengumpulan data dan alat penunjang apa saja yang digunakan. Keenam mengenai analisis data yang digunakan untuk pemecahan masalah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV berisikan deskripsi wilayah penelitian dengan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyajian data dan gambaran umum lokasi penelitian, data fokus penelitian yang kemudian data-data dari hasil penelitian tersebut dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V : PENUTUP

Pada BAB V berisi kesimpulan mengenai pembahasan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan oleh penulis dari masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Bintoro Tjokroamidjojo (1974:13) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai kehidupan bangsa. Menurut Hakim (2016:40) administrasi pembangunan adalah proses yang dilakukan oleh administrator dalam upaya mendorong masyarakat ke arah modernisasi yang multi-dimensional secara administratif. Sedangkan menurut Fred W. Riggs (1994) dalam Ngusmanto (2015) Pengertian administrasi dapat dirumuskan melalui 2 kesimpulan umum. Pertama, administrasi pembangunan berkaitan dengan proses administrasi dari suatu program pembangunan, dengan metode-metode yang digunakan oleh organisasi besar terutama pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan mereka. Kedua, arti dari istilah administrasi pembangunan dikaitkan dengan implikasinya, tidak dengan pengertian secara langsung. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kemampuan administratif.

2. Perempuan dalam Pembangunan (WID)

Ungkapan “Perempuan dalam Pembangunan” atau WID dalam Claros dan Zahidi (2005), sedikit banyak menyimpulkan ungkapan pemikiran pertama mengenai peran perempuan dalam pembangunan dan pendekatan yang telah kita cakup begitu jauh. Ungkapan itu diciptakan pada awal 1970an oleh *Women’s Committee of the Washington D.C. Chapter of the Society for Internasional Development* sebagai bagian dari strategi cermat untuk membawa pemikiran baru Boserup dan lain-lainnya agar menjadi perhatian para pembuat kebijakan Amerika. Sejak itu, WID digunakan sebagai steno bagi pendekatan terhadap isu perempuan dan pembangunan yang sebagian besar didasarkan kepada paradigma modernisasi. Pendekatan WID di fokuskan kepada inisiatif seperti pembangunan teknologi yang lebih baik, yang tepat, yang akan meringankan beban kerja perempuan. WID bertujuan untuk benar-benar menekankan sisi produktif kerja dari tenaga perempuan khususnya penghasilan pendapatan dengan mengabaikan sisi reproduktifnya, dan disini pendekatan itu memperlihatkan asalnya dari kaum liberal Utara pada 1970an dan 1980an.

Pembangunan hanya akan efisien bila perempuan dilibatkan. Pengakuan bahwa “50 persen sumber daya manusia bagi pembangunan di sia-siakan atau tidak dimanfaatkan sepenuhnya”, mewakili perubahan penekanan dari perempuan sendiri sebagai fokus kepedulian, ke kontribusi mereka memanfaatkan pembangunan untuk bekerja. Kecemasan di kalangan perencana pembangunan bahwa banyak sekali uang dan sumber daya

lainnya tidak berhasil membuat dampak penting apa pun, menurut Moser, menjadikan pendekatan efisiensi dengan cepat diambil sebagai model bagi WAD. Catatan Moser tentang pendekatan efisiensi menjelaskan bahwa pendekatan itu memiliki “implikasi bagi perempuan tidak hanya sebagai penghasil keturunan, tetapi juga semakin meningkat menjadi manjer komunitas. Pendekatan efisiensi bekerja pada tingkat yang berbeda. Memastikan efisiensi dalam proyek pembangunan menurut keterlibatan perempuan karena mereka sering lebih efisien dan setia dibanding laki-laki.

3. Perempuan dan Pembangunan (WAD)

Perempuan dan Pembangunan (WAD) merupakan satu pendekatan feminis neo-Marxis, yang muncul dalam paruh terakhir 1970an yang berasal dari suatu kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi. Bukannya menitikberatkan kepada strategi untuk “mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan”, pendekatan ini justru menunjukkan bahwa perempuan selalu penting secara ekonomi, dan kerja yang dilakukannya dalam rumah tangga dan komunitasnya sangat mendasar untuk mempertahankan masyarakat mereka. WAD mengakui bahwa laki-laki miskin juga menjadi korban dari proses pembangunan yang mengabaikan mereka, tetapi proses itu cenderung mengelompokkan perempuan tanpa menganalisis pembagian kelas, ras dan etnis di antara mereka secara memadai. Pendekatan WAD berasumsi bahwa posisi perempuan akan lebih baik selama dan ketika struktur internasional menjadi lebih adil, dan dalam hal ini, pendekatan itu cenderung kurang

mengindahkan sifat penindasan gender khusus perempuan. Posisi perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas, ketimbang sebagai akibat dari ideologi dan struktur patriarki. Pendekatan WAD cenderung menitik-beratkan kepada kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang disumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga (Claros dan Zahidi: 2005).

4. Pendekatan Pemberdayaan atau Gender dan Pembangunan (GAD)

Satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan – kerja produktif, reproduktif, privat dan publik – dan menolak upaya apa pun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga, mulai dikenal sebagai “pemberdayaan” atau secara lebih umum pendekatan “Gender dan Pembangunan” (*Gender and Development-GAD*) terhadap perempuan dalam pembangunan. Kendati populer di kalangan pelaksana pembangunan yang bekerja dengan kerangka kerja feminis, pendekatan pemberdayaan dipandang dengan curiga oleh banyak lembaga bantuan dan pemerintah Dunia Ketiga. Pendekatan ini mempertanyakan teori-teori yang lazim diterima tentang apa yang dibawa oleh pembangunan yang baik, yang menegaskan bahwa ada nilai lebih dalam pembangunan daripada sekedar pertumbuhan ekonomi dan penggunaan uang yang efisien, serta menolak gagasan bahwa perempuan

ingin “diintegrasikan” ke dalam arus utama pembangunan yang dirancang Barat, dimana mereka memiliki sedikit peluang menentukan jenis masyarakat apa yang diinginkannya. Pendekatan pemberdayaan berbeda dengan dengan pendekatan-pendekatan lainnya dalam analisisnya terhadap asal, dinamika dan struktur penindasan perempuan, serta bagaimana pendekatan itu berniat mengubah posisi perempuan Dunia Ketiga. Proses perubahan, dan penagruhnya atas kesadaran orang-orang yang menjalankan pembangunan, seringkali sama pentingnya dengan perubahan itu sendiri.

Pemberdayaan lebih terkait dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) ketimbang pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*), dan kebanyakan pemikiran tentang pemberdayaan datang dari tulisan feminis dan gerakan perempuan yang muncul di selatan.sesungguhnya pendekatan ini lebih merupakan pendekatan perempuan selatan terhadap pembangunan, ketimbang pendekatan laki laki kulit putih utara.pendekatan ini melacak akar akar subordinasi dalam ras, kelas, sejarah kolonial, dan posisi negara negara selatan dalam tata ekonomi internasional. Pendekatan ini memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang undang yang berkenaan dengan kesamaan antara laki laki dan perempuan ketimbang pemberdayaan perempuan itu sendiri untuk berusaha mengubah dan mentransformasikan struktur yang sangat bertentangan dengan mereka-seperti undang undang perburuhan, kontrol laki laki atas

tubuh dan hak reproduktif perempuan, undang –undang sipil, dan hak atas kekayaan.

Sementara pendekatan persamaan juga melihat perlunya melakukan reformasi struktur-struktur ini, pendekatan ini berbeda dari pemberdayaan dalam hal keyakinannya bahwa perubahan yang dipaksakan dari atas itu lebih efektif. Pendekatan pemberdayaan, seraya mengakui perlunya pembuatan undang undang yang bersifat mendukung, berpendapat bahwa perkembangan organisasi perempuan, yang mengarah kepada mobilisasi politik, peningkatan kesadaran dan pendidikan rakyat, merupakan syarat penting bagi perubahan sosial yang berkelanjutan. Organisasi perempuan menawarkan kemungkinan pemberdayaan dan perubahan pribadi, dan juga memberikan konteks bagi transformasi pribadi ini menuju aksi politik.. kelompok perempuan yang paling berhasil adalah kelompok-kelompok yang bergerak di sekitar kebutuhan khusus, misalnya dalam bidang kesehatan atau pekerjaan, dan kemudian terus berjuang demi isu-isu jangka panjang (Claros dan Zahidi: 2005).

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat dalam Mardikanto dan Soebianto (2015:34), pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat, termasuk kesetaraan gender, agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama di dalam setiap pengambilan keputusan politik, terutama yang terkait dengan kebijakan

pembangunan. World Bank (2001) dalam Mardikanto dan Sobianto (2015:28) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Pengertian tersebut, mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat antara lain dalam arti:

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan;
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan);
- c. Kemerdekaan dari segala penindasan;
- d. Terjaminnya keamanan
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran

2. Tujuan pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat tentunya memiliki suatu tujuan. Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2015:111-112) yaitu:

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.

Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup;

- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran;
- c. Perbaikan tindakan (*better action*) dengan berbekal pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik;
- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) dengank perbaikan / tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring dan kemitraan-usaha;
- e. Perbaikan usaha (*better business*) perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;
- f. Perbaikan pendapatan (*better income*) dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya;
- g. Perbaikan lingkungan (*better environment*) perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena

kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;

- h. Perbaikan kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan dan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;
- i. Perbaikan masyarakat (*better community*) keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3. Tahapan-Tahapan Kegiatan Pemberdayaan

Tim Delivery (2004) dalam Mardikanto dan Soebianto (2015:125) menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. Seleksi Lokasi/Wilayah

Seleksi lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan (Mardikanto & Soebianto 2015:125).

b. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi, merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan atau

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan (Mardikanto & Soebianto 2015:125).

c. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut bersama-sama melakukan hal-hal berikut (Mardikanto & Soebianto 2015:125):

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya.
- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian
- 3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok
- 4) Memantau proses hasil kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif (participatory monitoring and ecaluation/PME)

d. Pemandirian Masyarakat

Berpegang dalam prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya (Mardikanto & Soebianto 2015:127).

4. Aktor dalam Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan dilakukan oleh beberapa aktor yang memegang peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Aktor-aktor dalam pemberdayaan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini peran mereka saling berkaitan pada proses pemberdayaan yang dilakukan dalam pembangunan nasional. Ambar Teguh Sulistiyani (2004:97) mengemukakan pemberdayaan masyarakat miskin perlu dirancang kontribusi masing-masing aktor, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat sehingga berbentuk model kemitraan yang diharapkan memiliki peran seperti table berikut:

Tabel 3. Peran Tiga Aktor Pemberdayaan Masyarakat

Aktor	Peran dalam Pemberdayaan	Bentuk Output Peran
Pemerintah	Formulasi dan penetapan kebijakan, implementasi monitoring dan evaluasi serta mediasi	Berbagai macam kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, penetapan indikator, pembuatan juklak, penyelesaian sengketa
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi <i>monitoring</i> dan evaluasi	Konsultasi & rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan pemeliharaan
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi	Saran, kritik, input, partisipasi, menghidupkan fungsi kontrol sosial, menjadi objek

Sumber: Sulistiyani (2014:97)

D. Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah usaha perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya (Parawansa:2006). Pada hakekatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya untuk memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumberdaya pembangunan.

Undang-undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga, masyarakat dan pembangunan. Amanat undang-undang itu dijabarkan dalam arah kebijakan untuk kedudukan dan peranan perempuan yang dinyatakan dalam GBHN 1999 yang terangkum dalam sebuah visi pembangunan pemberdayaan perempuan yaitu “Kesetaraan dan Keadilan Gender untuk mewujudkan kemitraan yang harmonis dan saling menguntungkan bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara”. Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan pemberdayaan perempuan yaitu melaksanakan 5 Agenda Pokok Nasional yang dikutip dalam buku

Mengukir Paradigma Menembus Tradisi (Parawansa, 2006:73-74) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam bidang-bidang strategis:
 - a. Pendidikan (Spiritual, Intelektual, dan Pratikal).
 - b. Kesehatan perempuan, anak, remaja dan perempuan usia lanjut.
 - c. Peningkatan akses terhadap sumber daya pembangunan.
 - d. Peningkatan produktivitas dan perlindungan bagi Nakerwan
2. Kesetaraan dan keadilan jender di semua bidang dan sektor pembangunan.
3. Penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang didasari oleh kebijakan *Nasional Zero Tolerance Policy* (tindakan kekerasan sekecil apapun tidak dapat ditoleransi)
4. Penghormatan martabat dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan.
Peningkatan penghormatan dan martabat, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan termasuk hak-hak reproduksi untuk mendukung kemajuan dan peran aktif perempuan dalam berbagai kehidupan berkeluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Pemampuan Lembaga Pengelola Kemajuan Perempuan. Pemberdayaan institusi pelayanan publik yang mendukung kemajuan perempuan.

Lebih spesifik menurut Parawansa (2006:74) program pemberdayaan perempuan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan meliputi: (1) Pemampuan perempuan di bidang kewirausahaan dalam rangka

menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif yang dikelola perempuan; (2) Peningkatan akses perempuan terhadap informasi pada sumber daya modal, kredit dan informasi pasar; (3) Pemantapan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara kelompok usaha ekonomi kecil dan menengah dengan swasta, BUMN dan koperasi; (4) Pembaruan dan penyempurnaan dan peraturan perundang-undangan yang berspektif dan berkeadilan gender.

2. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Menurut Nugroho (2008:164) program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan memiliki tujuan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan yang terjadi selama ini.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.

4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

D. Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera

1. Pengertian

Salah satu upaya Pemerintah bersama masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan melalui Peningkatan Peran Perempuan dalam pembangunan adalah melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Program Terpadu P2WKSS merupakan salah satu program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan yang berupaya untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan masyarakat desa/kelurahan, dengan perempuan sebagai penggerak. Kegiatan penilaian ini merupakan hasil dari pembinaan Tim Daerah dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan perempuan di suatu Desa/Kelurahan.

Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan terkoordinasi dalam pola Program terpadu P2WKSS yang tertuang dalam proyek-proyek Sektor yang menangani program yang dimaksud sesuai

dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing serta peran aktif gerakan PKK terutama peran kader-kader PKK di tingkat Desa/Kelurahan.

Selanjutnya sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat khususnya perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang terpadu di Desa/Kelurahan melalui pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mewujudkan keluar sehat sejahtera, di perlukan suatu Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).

Pada hakekatnya evaluasi ini dimaksudkan untuk mendorong upaya-upaya pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya keluarga yang berkualitas, melalui peran-peran perempuan dan didukung oleh sektor-sektor yang lain. Evaluasi tersebut terkait dengan terpeliharanya lingkungan dengan mempertimbangkan faktor kesulitan pada masing-masing wilayah Desa/Kelurahan.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indah Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Intruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
- g. Peraturan Menteri dalam Negeri RI no. 26 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera di daerah;
- h. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
- i. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur;

- k. Peraturan Daerah No. DPA:914/229/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknik Daerah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur.

3. Tujuan

a. Tujuan Umum

Meningkatkan peran Perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan status pendidikan perempuan;
- 2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku positif keluarga dan perempuan khususnya di berbagai bidang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan keluarga;
- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap anak dan remaja;
- 4) Meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan keluarga;
- 5) Meningkatkan kesadaran akan pelestarian lingkungan hidup;

- 6) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- 7) Memberdayakan kaum lansia;
- 8) Meningkatkan perekonomian lokal.

4. Kebijakan

Kebijakan program terpadu P2WKSS dilaksanakan dengan acuan adalah sebagai berikut:

- a. P2WKSS dilaksanakan melalui pendekatan lintas bidang pembangunan yang terkait dan lintas program secara terintegrasi dan partisipasi penuh masyarakat;
- b. P2WKSS dilaksanakan dengan memanfaatkan pedoman pelaksanaan yang relevan dengan tetap mempertimbangkan potensi dan karakteristik daerah masing-masing;
- c. P2WKSS dilaksanakan dengan menggunakan data dan mengoptimalkan berbagai sumberdaya yang tersedia baik dari Pemerintah, dunia usaha, LSM dan masyarakat;
- d. Bagi kabupaten/kota yang sudah 2 kali sebagai Pelaksana Terbaik I secara berturut-turut diharap tidak mengikuti evaluasi lagi.

5. Ruang Lingkup

- a. Program Terpadu P2WKSS adalah program peningkatan peranan perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan, secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk

meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.

b. Sasaran Program Terpadu P2WKSS adalah Keluarga dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah dalam kategori keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera utamanya yang rawan sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

c. Evaluasi Program Terpadu P2WKSS adalah evaluasi perkembangan kelompok kegiatan meliputi:

1) Kelompok Kegiatan Dasar (KDD) :

- a) Kegiatan percepatan pemberantasan buta aksara;
- b) Kegiatan penyuluhan/ meningkatkan kesehatan ibu dan anak;
- c) Kegiatan penyuluhan pertanian serta pemanfaatan pekarangan;
- d) Kegiatan penyuluhan dan pelayanan lanjut usia;
- e) Kegiatan penyuluhan kesetaraan dan keadilan gender;
- f) Kegiatan pemeliharaan kesehatan lingkungan dan fasilitas air bersih;
- g) Kegiatan penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana;
- h) Kegiatan penyuluhan hukum;
- i) Kegiatan pengkoperasian dan kewirausahaan;
- j) Kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan.

2) Kelompok Kegiatan Lanjutan (KKL) :

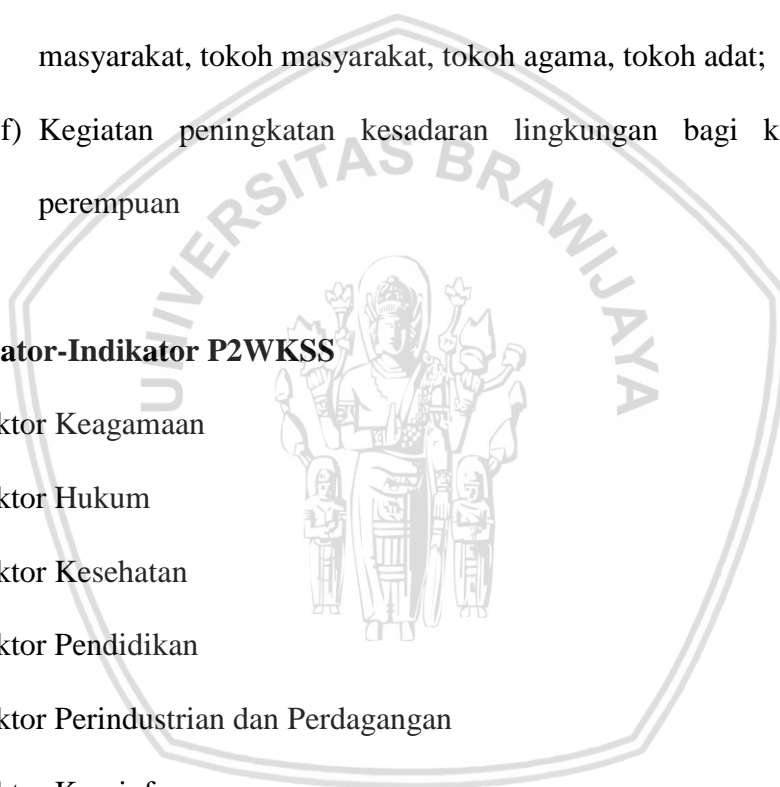
- a) Sub Kelompok Kegiatan Pembinaan Lanjutan, meliputi:

- Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga, antara lain: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, koperasi dan usaha kelompok perempuan.
 - Pemantapan penyelenggaraan pelayanan terpadu KB, kesehatan dan posyandu;
 - Melembagakan dan membudayakan Keluarga berkualitas dan mandiri;
 - Kegiatan lanjutan penyuluhan gerakan hidup bersih;
 - Pemantapan penyuluhan 10 Program Pokok PKK;
 - Kegiatan keterampilan teknologi agribisnis.
- b) Sub Kelompok Kegiatan Usaha perluasan Kesempatan Kerja dan berusaha bagi perempuan untuk meningkatkan penghasilan bagi diri sendiri dan keluarganya, antara lain dengan industri kerajinan rumah tangga, makanan kecil, budaya usaha-usaha kecil, tanaman obat-obatan pekarangan.
- c) Sub Kelompok Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam lingkup pembinaan dan remaja, termasuk Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL).
- 3) Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP) :
- a) Pemantapan forum koordinasi dan konsultasi yang telah ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan;
 - b) Kursus atau pelatihan P2WKSS desa/kelurahan;

- c) Penyuluhan keluarga bahagia sejahtera, Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4), pendalaman agama, status dan peran perempuan dalam mewujudkan keluarga sakinah;
- d) Kegiatan penyuluhan dan pengembangan kesadaran hukum bagi perempuan;
- e) Penyuluhan gender pada keluarga atau kelompok-kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat;
- f) Kegiatan peningkatan kesadaran lingkungan bagi keluarga dan perempuan

6. Indikator-Indikator P2WKSS

- a. Sektor Keagamaan
- b. Sektor Hukum
- c. Sektor Kesehatan
- d. Sektor Pendidikan
- e. Sektor Perindustrian dan Perdagangan
- f. Sektor Kominfo
- g. Sektor Koperasi & UKM
- h. Sektor Sosial
- i. Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
- j. Sektor Ketahanan Pangan
- k. Sektor PKK



l. Sektor Narkotika

m. Sektor Kependudukan dan KB



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang mutlak dan sangat penting dalam segala bentuk penelitian ilmiah, karena berhasil tidaknya satu penelitian tergantung pada tepat tidaknya metode yang digunakan.

Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sehubungan dengan pendapat yang di atas maka sangat penting bagi penulis untuk memahami metodologi penelitian sebelum melakukan kegiatan penelitian agar penelitian ini memperoleh nilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu "penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, tindakan, motivasi dan lain sebagainya. Secara holistic dalam bentuk kata-kata dan bahasa" ³². Peneliti merasa cocok menggunakan pendekatan ini, karena hasil dari penelitian ini bermula dari proses pengamatan serta bisa memahami fenomena yang belum banyak diketahui sampai saat ini secara mendalam.³³

Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan makna, mengenai sesuatu

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya 2002), hal. 6

³³ *Ibid*, hal 175

dari subyek penelitian. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, Dapat diketahui bagaimana proses komunikasi Tianshi *marketing network* pada *support system* Unicore mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode diskriptif alasan digunakan metode ini karena metode deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci mengenai suatu gejala yang ada sesuai dengan variabel - varibel yang diteliti.³⁴

Oleh karena itu dalam metode ini, peneliti tidak untuk menguji hipotesa atau teori melainkan hanya mendiskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti dan tidak bertindak sebagai pengamat tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori.

Dengan menggunakan metode ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan informasi atau data sebanyak-banyaknya yang dikenakan dengan distributor Tianshi *marketing network* (mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya).

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang ditunjuk oleh peneliti dan dianggap memiliki pengetahuan yang luas terhadap obyek penelitian. Adapun subyek penelitian ini adalah distributor Tianshi *marketing network* di IAIN Sunan Ampel Surabaya yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

³⁴ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Akasara 1995), hal. 26

- Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Telah melakukan 15 kali presentasi bisnis MLM Tianshi
- Telah menjalankan MLM Tianshi minimal selama 2-3 bulan.
- Telah memiliki downline dalam jaringannya minimal 3 orang

Untuk informan yang yang dimaksudkan dalam syarat diatas tercantum dalam Tabel 3.1 : Daftar Informan Pelaku Tianshi *Marketing Network*

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian diantaranya:

1. Data Primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang secara khusus di kumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.³⁵ data ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan distributor Tianshi marketing network. Tujuannya untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data mengenai proses komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan pesan dan meyakinkan orang lain (prospek).
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Melainkan data yang berupa studi kepustakaan, yaitu dengan jalan mempelajari artikel atau jurnal

³⁵ Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada 2004) hal. 254

yang dimiliki network marketing tianshi, serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Misalnya, meliputi data tentang *company profil*, sistem *marketing*, produk, *marketing plan*, *multiply*, sistem pendidikan Unicore sebagai *support system* dari tianshi.

Informan, adalah orang yang benar-benar tahu dan terlibat dalam subyek penelitian tersebut, Peneliti memutuskan siapa orang yang dapat memberikan informasi yang relevan yang dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian. Disini peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan siapa informan yang hendak diwawancarai.

Tabel 3.1 : Daftar Informan Distributor Tianshi Marketing Network

No.	Nama	Semester	Jurusan/ Fakultas
1	Yanti	4	Psi/ Dakwah
2	Hamidah	4	BSA/ Adab
3	Sulung	8	Psi/ Dakwah
4	Kholiq	8	SPI/ Adab
5	Hanim	6	Muamalah/ Syariah
6	Nened	4	Psi/ Dakwah
7	Puput	4	Psi/ Dakwah
8	Irfa'i	6	PBA/ Tarbiyah
9	Syafi'i	6	AS/ Syariah
10	Zaenal	6	PBI/ Tarbiyah

D. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada 4 tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan pengambilan data yaitu dengan prosedur :

1. Tahapan Pra Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan berbagai persiapan baik yang berkaitan dengan konsep penelitian maupun persiapan perlengkapan yang dibutuhkan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah:

a. Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat usulan penelitian atau proposal penelitian yang sebelumnya di diskusikan dengan dosen pembimbing, untuk kemudian diseminarkan dengan beberapa dosen pendamping. proposal penelitian ini terdiri dari latar belakang, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, kerangka teoritik, pemilihan lapangan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data serta tehnik keabsahan data.

b. Memilih lapangan penelitian

Dalam hal ini peneliti mengambil judul model komunikasi pembangunan dalam mensosialisasikan peraturan desa. Lokasi yang dipilih peneliti adalah di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

c. Mengurus perizinan

Pada tahap yang ke tiga ini, Peneliti mengajukan permohonan kepada Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi dan diberikan kepada

Rektor IAIN Sunan Ampel untuk memperoleh izin penelitian di lingkungan IAIN Sunan Ampel selama proses penelitian dan penggarapan laporan skripsi berlangsung.

d. Persiapan diri

Adapun yang dilakukan oleh peneliti disini yaitu mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian terutama dalam hal wawancara harus mempersiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu agar peneliti nantinya, mempunyai gambaran kalimat pertanyaan apa saja yang akan peneliti ajukan.

e. Menyiapkan perlengkapan

Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti agar proses penelitian berjalan lancar terutama pada saat wawancara yaitu menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan seperti : *Blocknote*, *Tape Recorder*, Kamera dan sebagainya. Agar hasil wawancara tercatat dengan baik sehingga karyanya dapat didokumentasikan.

2. Tahapan Lapangan

Tahap ini peneliti lebih fokus pada pencarian pengumpulan data dilapangan, serta mengamati segala bentuk aktivitas yang ada dilokasi penelitian. Sambil menulis catatan lapangan untuk tahap berikutnya. Meskipun tidak mungkin seseorang melakukan dua hal secara bersamaan, akan tetapi dengan catatan lapangan ini, diharapkan peneliti akan lebih paham dan ingat akan data-

data yang diperoleh pada tahapan ini.

3. Tahap Analisis Data

Yaitu tahap dimana peneliti mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pada tahap ini, pada tahap ini peneliti mulai menelaah seluruh data yang terkumpul seperti hasil wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dokumentasi dan data lain yang kemudian di klasifikasi dan dianalisa dengan menggunakan analisa induktif.

4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap dimana peneliti menuangkan hasil dari penelitian ke dalam suatu laporan. Tahap ini adalah tahap akhir dari seluruh prosedur penelitian, dan disini peneliti dituntut kekreatifanya dalam menulis. Tentunya penulisan laporan sesuai dengan prosedur penelitian, karena penulisan yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik pula terhadap penelitian. Adapun penulisannya mulai dari tahap pertama yaitu perumusan masalah sampai tahap akhir yaitu analisa data yang ditunjang dengan keabsahan data yang ditulis dalam penulisan yang berbentuk skripsi. Dalam penulisan laporan ini ditunjang sistematika pembahasan.³⁶

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 85

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan terlibat menurut becker et al. adalah pengamatan yang dilakukan sambil sedikit banyak berperan serta dalam kehidupan orang yang kita teliti pengamatan terlibat mengikuti orang-orang yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari mereka, melihat apa yang mereka lakukan, kapan, dengan siapa dan dalam keadaan apa, menanyai mereka mengenai tindakan mereka.³⁷

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi, ide melalui tanya jawab.³⁸ Sebelum melakukan wawancara peneliti meminta izin dengan cara menunjukkan surat jalan. Dalam wawancara peneliti berusaha memperoleh informasi mengenai pola komunikasi yang digunakan oleh pelaku network marketing tianshi menyampaikan pesan dan mempengaruhi prospekannya yang juga mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya serta informasi faktor yang mempengaruhi mahasiswa IAIN menjalankan Network Marketing Tianshi.

3. Dokumentasi

Yaitu proses melihat kembali data-data dari dokumentasi berupa segala macam bentuk informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud

³⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigama Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) Hal.162

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*, hal 240

dalam bentuk tertulis atau mencari data. Mengenai hal-hal yang berupa catatan kegiatan dari distributor Tianshi *marketing network*, artikel tentang Tianshi *marketing network*, video, foto dan *slide-slide* tentang Tianshi *marketing network* dan perkembangan eksistensi tianshi dalam dunia *multi level marketing*.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data berkaitan dengan bagaimana peneliti akan menerapkan prosedur penyelesaian masalah untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah jenis analisis kualitatif. Penelitian kualitatif ini bersifat induktif yaitu peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen dan catatan.

Studi ini akan menggali dan menggabungkan dari sumber data yang tersedia yaitu:

- a. Sumber kepustakaan, maksudnya adalah memperoleh data teoretis dengan cara membaca, mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Sumber lapangan, maksudnya adalah mencari data dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian untuk memperoleh data yang konkrit tentang segala sesuatu yang diselidiki.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Ketentuan Pengamatan

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. ketentuan pengamatan dilakukan dengan teknik melakukan pengamatan yang diteliti, rinci dan terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung yang diikuti dengan kegiatan wawancara secara intensif kepada subjek agar data yang dihasilkan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Triangulasi

Untuk mendapatkan kesahihan hasil sebuah penelitian, pertama kali sebelum menentukan dan memutuskan analisis data, dilakukan pemeriksaan kesahihan untuk mengetahui kebenaran dan keakuratan data yang diperoleh dalam penelitian ini. Triangulasi dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Triangulasi Sumber, digunakan untuk menguji derajat ketepatan dan kelengkapan data.
- b. Triangulasi Personal (informan), digunakan untuk menguji atau mengecek derajat keakuratan dan kesahihan data.
- c. Triangulasi Teori, digunakan untuk menguji atau mengecek derajat kepercayaan temuan atau hasil penelitian.
- d. Triangulasi Metode digunakan untuk menguji atau mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian.

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi personal

(informan) yang dilakukan dengan cara mengecek, mengevaluasi, dan mendiskusikan data dengan informan dan pembimbing. Dalam penelitian ini, data sebagai bahan baku sangat penting untuk diakui derajat ketepatan dan kelengkapannya. Triangulasi data dilakukan sejak pengumpulan data sampai analisis data dilakukan.³⁹



³⁹<http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:JOjAfQvnc44J:datasastra.googlepages.com/08agus4.pdf+triangulasi+dalam+metode+penelitian>

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

a. Sejarah Kabupaten Jombang

Jombang termasuk Kabupaten yang masih muda usianya, setelah memisahkan diri dari gabungannya dengan Kabupaten Mojokerto yang berada di bawah pemerintahan Bupati Raden Adipati Ario Kromodjojo, yang ditandai dengan tampilnya pejabat yang pertama mulai tahun 1910 sampai dengan tahun 1930 yaitu : Raden Adipati Ario Soerjo Adiningrat.

Menurut sejarah lama, konon dalam cerita rakyat mengatakan bahwa salah satu desa yaitu desa Tunggorono, merupakan gapura keraton Majapahit bagian Barat, sedang letak gapura sebelah selatan di desa Ngrimbi, dimana sampai sekarang masih berdiri candinya. Cerita rakyat ini dikuatkan dengan banyaknya nama-nama desa dengan awalan "Mojo" (Mojoagung, Mojotrisno, Mojolegi, Mojowangi, Mojowarno, Mojojejer, Mojodanu dan masih banyak lagi).

Salah satu peninggalan sejarah di Kabupaten Jombang yaitu Candi Ngrimbi, Pulosari, Bareng Bahkan di dalam lambang daerah Jombang sendiri dilukiskan sebuah gerbang, yang dimaksudkan sebagai gerbang Mojopahit dimana Jombang termasuk wewenangnya Suatu catatan yang pernah diungkapkan dalam majalah Intisari bulan Mei 1975 halaman 72,

dituliskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Kromodjojo kepada residen Jombang tanggal 25 Januari 1898 tentang keadaan Trowulan (salah satu *onderdistrict afdeeling* Jombang) pada tahun 1880.

Sehingga kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya bukan dimulai sejak berdirinya (tersendiri) Kabupaten jombang kira-kira 1910, melainkan sebelum tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi *onderdistrict afdeeling* Jombang, walaupun saat itu masih terjalin menjadi satu Kabupaten dengan Mojokerto. Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistem pemerintahan Kabupaten Jombang telah terkelola dengan baik adalah saat itu telah ditempatkan seorang Asisten Resident dari Pemerintahan Belanda yang kemungkinan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Jombang Lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya Gereja Kristen Mojowarno sekitar tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung di Kota Jombang, juga tempat peribadatan Tridharma bagi pemeluk Agama Kong hu Chu di kecamatan Gudo sekitar tahun 1700.

Konon disebutkan dalam ceritera rakyat tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmu yang berkaitan dengan pembuatan Masjid Agung di Kota Jombang dan berbagai hal lain, semuanya merupakan petunjuk yang mendasari eksistensi awal-awal suatu tata pemerintahan di Kabupaten Jombang.

b. Geografis

Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kota yang strategis. Secara geografis berada pada $112^{\circ}03'45''$ – $112^{\circ}27'21''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}20'21''$ – $07^{\circ}46'45''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.159,50 km². Ibu Kota Kabupaten Jombang mencapai ketinggian 41 meter di atas permukaan laut. Seperti daerah lain di Indonesia, dalam satu tahunnya berlaku dua musim. Musim penghujan pada bulan Oktober–April dan musim kemarau bulan April–Oktober. Meskipun dikatakan tidak jauh berbeda dengan di Jawa, namun struktur tanahnya yang tidak kedap air menyebabkan sektor pertanian masih banyak berharap hujan. Kondisi ini secara drastis akan menyebabkan kekurangan suplai air pada saat musim kemarau.

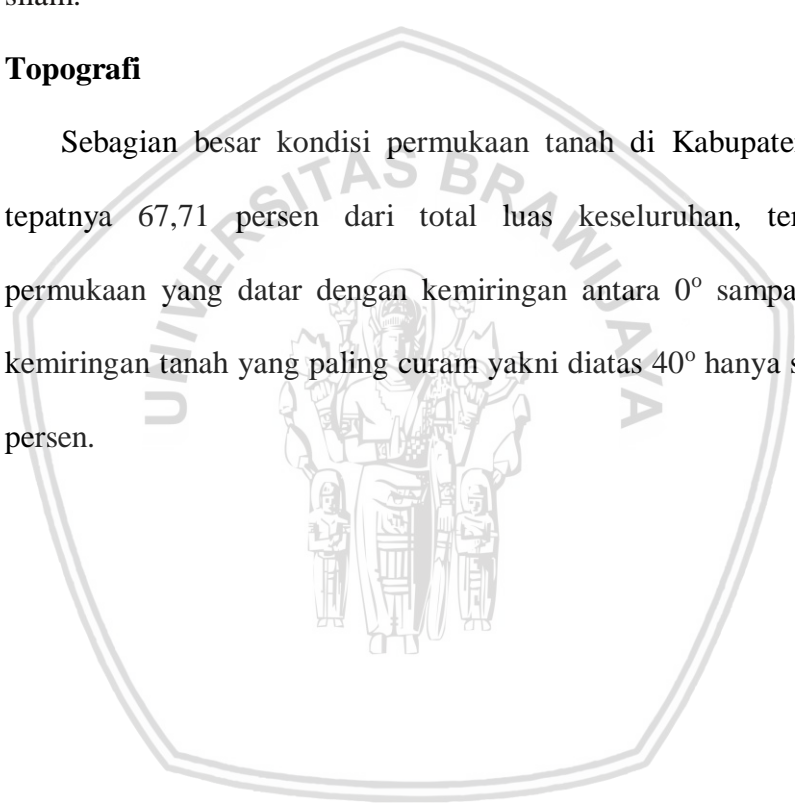
c. Iklim

Data indikator iklim meliputi curah hujan dan hari hujan. Curah Hujan merupakan besarnya volume/intensitas air hujan dalam kurun waktu tertentu yang diukur dengan alat penakar hujan dengan satuan mm. Hari Hujan adalah suatu hari dimana terjadi hujan dalam satu tahun. Data curah hujan ditampilkan dalam bentuk intensitas curah hujan di setiap stasiun penakar hujan per bulan selama dalam kurun waktu satu tahun pengamatan. Berdasarkan pantauan dari Dinas PU dan Pengairan Kabupaten Jombang, selama tahun 2016 terdapat 101 hari hujan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Jombang. Rata-rata hari hujan terbanyak terjadi di Bulan Februari. Sejalan dengan banyak-nya hari

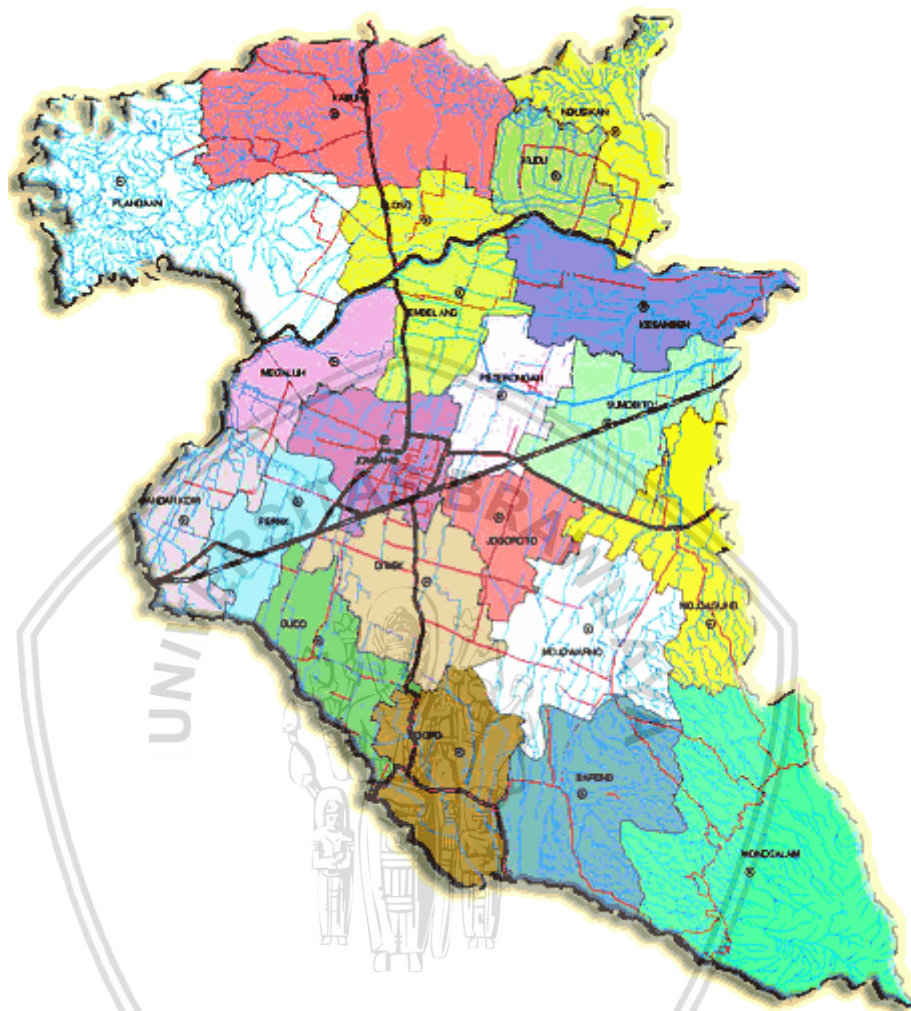
hujan, curah hujan tertinggi juga terdapat pada Bulan Februari sebanyak 472 mm³. Dalam kurun waktu tahun 2016, hujan turun sepanjang tahun Fenomena alam ini menyebabkan banjir di sejumlah kecamatan. Hal ini senada dengan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia lainnya dimana terjadi curah hujan tinggi tahun 2016 silam.

d. Topografi

Sebagian besar kondisi permukaan tanah di Kabupaten Jombang, tepatnya 67,71 persen dari total luas keseluruhan, terletak pada permukaan yang datar dengan kemiringan antara 0° sampai 2°. Untuk kemiringan tanah yang paling curam yakni diatas 40° hanya sebesar 6,97 persen.



e. Pembagian Wilayah Administratif



Gambar 2 Peta Administratif Kabupaten Jombang

Sumber: jombangkab.go.id

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), Kabupaten Jombang secara administratif terdiri atas 21 Kecamatan, dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 306. Adapun batasan wilayah Kabupaten Jombang secara administrasi terletak diantara :

Barat : Kabupaten Nganjuk;

Timur : Kabupaten Mojokerto;

Utara : Kabupaten Lamongan dan

Selatan : Kabupaten Kediri

**Tabel 4 Luas Wilayah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Jombang, 2016**

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bandar KM	43,623	43,892	43,917	44,041	44,476
2	Perak	51,551	51,951	52,062	52,29	53,223
3	Gudo	50,929	51,222	51,229	51,354	51,752
4	Diwek	102,739	103,748	104,175	104,847	107,8
5	Ngoro	69,506	69,915	69,932	70,11	70,698
6	Mojowarno	86,892	87,636	87,886	88,342	90,261
7	Bareng	49,999	50,326	50,371	50,532	51,119
8	Wonosalam	31,084	31,36	31,459	31,632	32,369
9	Mojoagung	74,415	75,209	75,583	76,134	78,611
10	Sumobito	78,56	79,414	79,824	80,422	83,119
11	Jogoroto	64,649	65,578	66,144	66,871	70,316
12	Peterongan	65,078	65,801	66,158	66,672	68,994
13	Jombang	140,178	141,809	142,664	143,848	128,067
14	Megaluh	36,911	37,157	37,198	37,324	37,791
15	Tembelang	49,969	50,328	50,408	50,603	51,363
16	Kesamben	60,667	61,079	61,152	61,365	62,165
17	Kudu	28,42	28,546	28,513	28,546	28,584
18	Ngusikan	21,131	21,258	21,266	21,323	21,517
19	Ploso	39,16	39,393	39,406	39,509	39,853
20	Kabuh	39,38	39,571	39,541	39,602	39,73
21	Plandaan	35,563	35,688	35,613	35,618	35,495
	Jumlah	1220,404	1230,881	1234,501	1240,985	1247,303

Sumber: Badan Pusat Statistika (Jombang dalam Angka 2017)

f. Penduduk

Jumlah penduduk kabupaten Jombang adalah 1.201.557 jiwa (2010)

terdiri dari 597.219 laki-laki dan 604.338 perempuan. Sedikitnya 55%

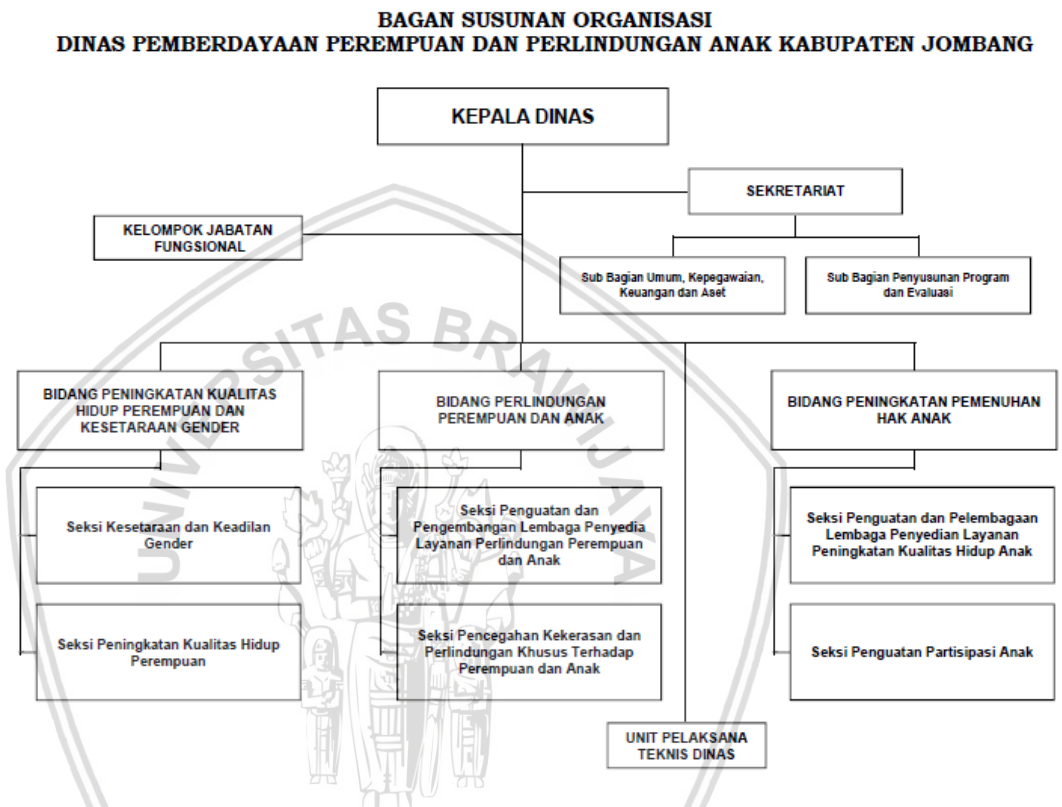
penduduk tinggal di wilayah perkotaan. Kepadatan penduduk di

Kabupaten Jombang sebesar 997 jiwa/km².

2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang

Anak Kabupaten Jombang

a. Susunan Organisasi



Gambar 3 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 - b) Sub Bagian Penyusunan Program dan evaluasi.

- 3) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesenjangan Gender, membawahi:
 - a) Seksi Kesenjangan dan Keadilan Gender; dan
 - b) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- 4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
 - a) Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - b) Seksi Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Khusus terhadap Perempuan dan Anak.
- 5) Bidang Peningkatan Pemenuhan Hak Anak, membawahi:
 - a) Seksi Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; dan
 - b) Seksi Penguatan Partisipasi Anak.
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas

Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2) Fungsi

- a) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e) Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f) Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Gambaran Umum Desa Kedungrejo Kabupaten Jombang

a. Letak Geografis Desa

Desa Kedungrejo terletak di wilayah Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ± 9 Km dari Kabupaten Jombang, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Ds.Bedahlawak Kec.Tembelang
- 2) Sebelah Selatan : Desa Balonggemek Kec. Megaluh
- 3) Sebelah Barat : Desa Pacarpeluk Kec.Megaluh
- 4) Sebelah Timur : Desa Sentul Kecamatan Tembelang

b. Luas wilayah dan Penggunaan Tanah

Luas wilayah Desa Kedungrejo adalah 141.016 Ha. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagai berikut :

Tabel 5 Luas Tanah Menurut Penggunaan

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Tanah fasilitas umum	20,04
2.	Sawah	104.590,00
3.	Tanah kering	36.405,96

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Desa Kedungrejo Kabupaten Jombang Tahun 2017

c. Pembagian Wilayah

Desa Kedungrejo terdiri dari 2 Dusun 3 RW (Rukun Warga) dan 19 RT (Rukun Tetangga). Perincian 2 Dusun tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dusun Bungkil : 8 RT dan 2 RW
- 2) Dusun Kedung : 11 RT dan 1 RW

d. Jumlah penduduk

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Kedungrejo keadaan per Maret 2017, sebanyak 2509 Jiwa, yang terdiri dari :

- Laki-laki : 1267 Jiwa
- Perempuan : 1242 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : 811 KK

B. Penyajian Data

1. Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) Di Desa Kedungrejo, Kabupaten Jombang

a. Tahap-Tahap Pemberdayaan perempuan melalui program P2WKSS di Desa Kedungrejo ditinjau dari Sektor Kesehatan

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, pelaksanaannya tidak terlepas dari tahap-tahap pemberdayaan. Terdapat tahap-tahapan yang meliputi:

1) Seleksi lokasi/wilayah

Dalam penetapan desa binaan P2WKSS, didahului dengan kegiatan survey ke desa, yang diikuti oleh Tim Pengelola P2WKSS Kabupaten Jombang, guna mengetahui kondisi desa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan P2WKSS Provinsi Jawa Timur 2016. Kemudian diadakan rapat koordinasi mengenai penetapan wilayah binaan yang diungkapkan oleh Pak Haris selaku seksi peningkatan kualitas hidup perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa:

“Untuk pemilihan lokasi itu diawali dari rakor jadi dimulai dari rakor dulu, dalam rakor tersebut nanti kita bicarakan evaluasi, program-program, dan juga kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di P2WKSS termasuk penentuan wilayah binaan. Setelah itu baru koordinasi pembuatan SK. Setelah selesai kita berikan kepada wilayah binaan termasuk SK itu isinya tim pembina, tim pelaksana, tim pengelola yang ada di kecamatan. Jadi SK itu ditindaklanjuti dari kecamatan membuat SK lagi untuk SK pengelola P2WKSS, nanti di

desa ditindaklanjuti lagi dengan SK dari kepala desa untuk SK pelaksana P2WKSS di desa yang ditunjuk.” (wawancara tanggal 05 Januari 2018, pukul 10.06 WIB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang)

Selain itu, untuk kriteria yang dipilih untuk dijadikan lokasi binaan yaitu desa yang masuk dalam kategori desa merah. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Pak Haris selaku seksi peningkatan kualitas hidup perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengungkapkan bahwa:

”untuk desa yang dipilih itu desa yang masuk kategori desa miskin atau desa merah. Yang jelas lokasi binaan P2WKSS itu adalah desa-desa yang dirasa kurang atau dirasa minus dalam hal pengelolaan pendidikannya, lingkungan hidupnya, pengelolaan dalam sumber daya manusianya. Wilayah lingkungannya masih minus lah. Jadi intinya yang ditunjuk adalah desa yang masih kurang dalam hal pembinaan masyarakat terutama dalam peranan wanitanya.” (wawancara tanggal 10 November 2017, pukul 10.16 WIB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang)

Pemilihan lokasi Desa Kedungrejo untuk menjadi lokasi sasaran program P2WKSS telah disepakati oleh berbagai pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Suyati selaku warga binaan P2WKSS di Desa Kedungrejo yakni:

“semua mendukung Desa Kedungrejo untuk dipilih menjadi wilayah sasaran P2WKSS. Jadi, seluruh kecamatan menunjuk Desa Kedungrejo semua” (wawancara pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 10.09 WIB di Musholla Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang)

Hal senada juga di ungkapkan warga binaan yang lain yakni Bu Iza yang mengungkapkan bahwa:

“satau saya, pemilihan lokasi P2WKSS di Desa Kedungrejo melalui kesepakatan oleh tiap kecamatan-kecamatan. Karena perangkat desa

mendukung, aparat mendukung, masyarakat juga mendukung jadi semua menunjuk Desa Kedungrejo” (wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.49 WIB di Rumah Bu Iza)

Pak Nurudin selaku Kepala Desa Kedungrejo juga mengungkapkan bahwa:

“pemilihan lokasi binaan P2WKSS ditentukan melalui koordinasi dari perwakilan seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang. Melalui koordinasi tersebut desa yang dipilih yaitu Desa Kedungrejo” (wawancara pada tanggal 16 Januari 2018, pukul 10.22 WIB di Kantor Kepala Desa Kedungrejo)

2) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi program terpadu P2WKSS ke desa binaan pada tanggal 20 Februari 2017 dihadiri dari unsur perangkat desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Pak Nurudin selaku Kepala Desa Kedungrejo mengungkapkan bahwa:

“Ada sosialisasi dari Pemkot Jombang khususnya dari tim penggerak P2WKSS kabupaten jombang yang dihadiri oleh Bu Catur Istri Bupati Jombang. Masyarakat juga dihadirkan.” (wawancara pada tanggal 16 Januari 2018, pukul 10.22 WIB di Kantor Kepala Desa Kedungrejo)

Senada dengan Pak Nurudin, Bu Iza selaku warga binaan P2WKSS di Desa Kedungrejo mengungkapkan bahwa:

“iya ada, sosialisasinya menghadirkan RT, RW, BPD, dan dinas terkait” (wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.49 WIB di Rumah Bu Iza)

Bu Suyati selaku warga binaan P2WKSS di Desa Kedungrejo juga mengungkapkan hal yang serupa, yakni:

“sosialisasi ada, berjalan lancar, sudah selesai. Yang diundang lembaga-lembaga dari 13 komponen itu. Dari peternakan yang

mewakili siapa, dari KB siapa, dari perindustrian siapa. Sosialisasinya mengenai apa sebenarnya P2WKSS, komponennya apa saja. Diberitahukan pedoman pelaksanaan P2WKSS apa saja juga diberikan buku” (wawancara pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 10.09 WIB di Musholla Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang)

Pak Haris selaku seksi peningkatan kualitas hidup perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa:

“untuk sosialisasi itu pesertanya agak lebih banyak daripada rakor sekitar 20-21 perwakilan dari masing-masing kecamatan, kalau sosialisasi sekitar 80 orang diadakan di Balai Desa Kedungrejo. Kita mengundang masyarakat dan pihak-pihak terkait P2WKSS dengan surat dari Sekda mengundang mereka untuk sosialisasi P2WKSS.” (wawancara tanggal 05 Januari 2018, pukul 10.06 WIB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang)

3) Proses pemberdayaan masyarakat

Dalam pelaksanaan program terpadu P2WKSS di Desa Kedungrejo Kecamatan Megaluh, baik Tim Pengelola Kabupaten, Kecamatan dan pelaksana desa melakukan pembinaan kepada Kader binaan dan warga sasaran binaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Haris selaku seksi peningkatan kualitas hidup perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni:

“Pada saat pembinaan ada kader yang ditunjuk sebagai koordinator masing-masing sektor yang bertanggungjawab ada satu orang yang lainnya itu sekretaris dan anggota. Dalam program P2WKSS pembinaan dilaksanakan empat kali. Untuk jangka panjang ketika desa sudah mandiri ya kita ganti kepada desa yang lain tapi tetap kita pantau melalui kecamatan. Mereka kan membuat laporan rutin ke kecamatan. laporan P2WKSS dari kecamatan tetap kita pantau, ada undangan untuk rapat, mereka bisa testimoni mengenai P2WKSS sebelum dan sesudahnya dan bisa memberi contoh kepada desa-desa lain. Rapat evaluasi biasanya di adakan di tingkat II bisa dua sampai

tiga kali dalam setahun” (wawancara tanggal 05 Januari 2018, pukul 10.06 WIB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang)

Senada dengan Pak Haris, Bu Iza selaku warga binaan P2WKSS di Desa Kedungrejo mengungkapkan bahwa:

“untuk pembinaan langsung ke kadernya, dari situ nanti kader-kader menerapkan ke sektor masing-masing” (wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.49 WIB di Rumah Bu Iza)

Selain itu, Pak Nurudin selaku Kepala Desa Kedungrejo mengungkapkan bahwa:

“pemberdayaan yang dilakukan khususnya di desa itu mengangkat potensi yang ada di desa berupa kegiatan ibu-ibu PKK. Nanti akan dibentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan potensi desa tadi yang berupa posyandu yang sudah ada di Desa Kedungrejo.” (wawancara pada tanggal 16 Januari 2018, pukul 10.22 WIB di Kantor Kepala Desa Kedungrejo)

Berrdasarkan pernyataan Pak Nurudin, dalam upaya peningkatan derajat kesehatan warga di Desa Kedungrejo telah tersedia fasilitas layanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari 1 Polindes, 3 Posyandu Balita, 2 Posyandu Lansia dan 1 Posyandu Remaja, yang didukung oleh tenaga kesehatan dan 1 Mobil Siaga Desa bantuan Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2014, dengan data pada tabel berikut:

Tabel 6 Data Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Lokasi
1.	Polindes	1	Dusun Kedung
2.	Posyandu Balita :		
	Posyandu Kedung	2	Desa Kedungrejo
	Posyandu Bungkil	1	Desa Kedungrejo
3.	Posyandu Lansia :		
	Posyandu Kedung	1	Desa Kedungrejo
	Posyandu bungkil	1	Desa Kedungrejo

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Lokasi
4.	Posyandu Remaja	1	Dusun Kedungrejo

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh Tahun 2017

Selain itu, pada program P2WKSS Desa Kedungrejo juga diberikan bantuan dari pemerintah berupa uang operasional dan alat permainan edukatif. Hal tersebut dikemukakan oleh Bu Suyati selaku warga binaan P2WKSS di Desa Kedungrejo bahwa:

“bantuan yang diberikan pemerintah itu uang operasional dan APE (alat permainan edukatif)” (wawancara pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 10.09 WIB di Musholla Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang)

Dengan adanya bantuan tersebut, kegiatan di posyandu diupayakan untuk mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat.

Kegiatan di setiap posyandu adalah sebagai berikut :

Meja 1 = pendaftaran

Meja 2 = penimbangan berat badan dan ukur tubuh

Meja 3 = pencatatan

Meja 4 = penyuluhan

Meja 5 = pelayanan

Setelah pasien mendaftar dengan membawa KMS maka kegiatan berikutnya adalah penimbangan badan dan ukur tubuh, setelah itu baru diadakan pencatatan oleh kader posyandu. Pencatatan dilakukan menggunakan format sistem informasi posyandu (SIP) atau sistem informasi manajemen (SIM) yang terdiri dari buku register keahlian atau kematian bayi, bumil, ibu melahirkan dan ibu nifas. Buku register PUS

dan WUS. Buku register bayi dan balita yang mencatat jumlah keseluruhan bayi dan balita di wilayah posyandu. Buku catatan kegiatan usaha, buku kegiatan pertemuan, buku pengelolaan keuangan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap posyandu yang ada di Desa Kedungrejo Kecamatan Megaluh meliputi :

a) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Pada kegiatan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

- Pelayanan kesehatan ibu

Jumlah seluruh ibu hamil di desa kedungrejo = 39 orang

Jumlah ibu hamil yang terdaftar di posyandu = 39 orang

Tabel 7 Jumlah Ibu Hamil yang memeriksakan kehamilannya ke petugas kesehatan

TAHUN	PENCAPAIAN
2015	64%
2016	78%
2017	97,4%

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh Tahun 2017

Untuk memberikan pemahaman kepada ibu hamil di Desa Kedungrejo juga dilakukan penyuluhan IMD dan ASI Eksklusif yang dilakukan 12 kali per tahun yang diadakan pada pertemuan KP-ASI, Posyandu, dan Kelas Ibu Hamil. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bu Suyati selaku warga binaan P2WKSS di Desa Kedungrejo bahwa:

“pembinaannya berupa sosialisasi PMT yang baik itu gimana, bayinya supaya gak gizi buruk gimana, yang gencar-gencarnya

disosialisasikan mengenai ASI. Capaiannya kesehatan balita meningkat, bebas dari bumil RESTI (Resiko Tinggi), bebas dari kematian saat ibu melahirkan” (wawancara pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 10.09 WIB di Musholla Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang)

- Pelayanan kesehatan anak

Selain pelayanan kesehatan ibu, juga terdapat pelayanan kesehatan anak seperti penimbangan balita. Berikut adalah pencapaian yang di hasilkan dalam pelayanan kesehatan anak di Desa Kedungrejo:

Tabel 8 Prosentase rata-rata jumlah balita ditimbang Tahun 2017

Jumlah Balita	Jumlah Balita Ditimbang	Target	Pencapaian
160	160	80%	100 %

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh Tahun 2017

Tabel 9 Prosentase rata-rata jumlah balita yang naik timbangannya Tahun 2017

Jumlah Balita Ditimbang	Jumlah Balita Naik berat badannya	Target	Pencapaian
160	129	70 %	80,6 %

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh Tahun 2017

Tabel 10 Jumlah bayi yang mendapat ASI Eksklusif Tahun 2017

Jumlah Bayi	Jumlah bayi yang mendapat ASI Eksklusif (0-6 bln)	Prosentase
Tahun 2016	86	81,1 %
Tahun 2017	152	87,9 %

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh Tahun 2017

b) Kesehatan Remaja

Untuk memantau kesehatan remaja, di Desa Kedungrejo sudah dibentuk posyandu remaja yang merupakan tempat pemberian informasi kesehatan maupun informasi penting lainnya kepada remaja secara rutin setiap bulannya. Tujuan adanya pelaksanaan kegiatan posyandu remaja yaitu untuk melibatkan remaja dalam upaya intervensi terkait permasalahan remaja, memantau kesehatan remaja secara berkala, mengedukasi remaja untuk hidup sehat, menurunkan angka pernikahan dini, dan membekali remaja untuk mempersiapkan masa depannya dengan menjadi generasi berencana yang kreatif dan berwawasan luas. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bu Suyati selaku warga binaan P2WKSS di Desa Kedungrejo bahwa:

“ada posyandu remaja kegiatannya ya diberikan sosialisasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi remaja seperti pubertas” (wawancara pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 10.09 WIB di Musholla Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang)

Dalam melaksanakan kegiatan, posyandu remaja dijalankan oleh kader remaja di daerah tersebut dan di dampingi oleh petugas kesehatan desa seperti bidan desa. Jumlah kader pada posyandu remaja minimal berjumlah 7 orang.

c) Kesehatan Lansia

Di Desa Kedungrejo sudah terbentuk lembaga posyandu lansia , yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Kedungrejo, nomor : 188/20/415.68.12/2014, yang merupakan wadah pembinaan lanjut

usia. Keanggotaan Karang Werdha adalah penduduk Desa Kedungrejo yang berusia pralansia 45-59 dan lansia mulai 60 - 70 tahun yang jumlahnya dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 19 Jumlah Penduduk Pralansia dan Lansia di Desa Kedungrejo

Dusun	Pralansia (Usia 45-59 Tahun)		Lansia (Usia 60-70 Tahun)	
	L	P	L	P
Kedung	119	139	72	85
Bungkil	90	88	43	61

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh Tahun 2017

Di Desa Kedungrejo Poyandu lansia ada 2, yaitu Posyandu di dusun Bungkil dan Posyandu di dusun Kedung. Kegiatan yang sudah dilaksanakan di Posyandu Lansia antara lain dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan, senam lansia, tensi, imunisasi Depteri, pemberian kapsul tambah darah, pemberian makanan tambahan. Kegiatan tersebut juga diungkapkan oleh Pak Nurudin selaku Ketua Pelaksana P2WKSS sekaligus Kepala Desa Kedungrejo yakni:

”Pelayanannya itu tidak hanya mengecek kesehatan termasuk yang lansia juga ada penambahan gizi jadi dari bantuan-bantuan itu diberikan makanan-makanan sehingga nanti di periksa untuk kesehatannya juga diberi makanan untuk menambah nilai gizi.” (wawancara pada tanggal 16 Januari 2018, pukul 10.22 WIB di Kantor Kepala Desa Kedungrejo)

d) Penanggulangan Gizi Buruk

Masyarakat Desa Kedungrejo, bukan hanya memperhatikan kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia saja, namun juga masyarakatnya. Berbagai kegiatan dilakukan untuk peningkatan kesehatan masyarakatnya salah satunya yaitu masyarakat melakukan kegiatan

penanggulangan gizi buruk yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan tersebut antara lain:

Tabel 12 Jenis kegiatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan gizi buruk

No	Jenis kegiatan	Tahun	
		2015	2016
1.	Pemberian taburia	2 x /th	2xkali
2.	Survey garam beryodium	1 x /th	1 x /th
3.	Pemberian vit A	2 x /th	2 x /th
4.	Penyuluhan gizi	4 x /th	4 x /th
5.	Taman pemulihan gizi	1 x /th	1 x /th
6.	Pemberian mineral mix	1 x/thn	1 x/thn
7.	Pemberian PMT	1 x/thn	1 x/thn
	Jumlah	7 kegiatan	

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh Tahun 2017

Selain kegiatan tersebut, masyarakat juga diberikan sosialisasi mengenai PMT dan gizi buruk. Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Suyati selaku warga binaan P2WKSS di Desa Kedungrejo bahwa:

“sektor kesehatan, kita diberi sosialisasi dari pemerintah mengenai PMT yang baik gimana, supaya gak gizi buruk gimana” (wawancara pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 10.09 WIB di Musholla Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang)

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan gizi buruk sangat baik terbukti ada 7 kegiatan yang berjalan secara rutin sesuai rencana kerja. Selain kegiatan tersebut juga terdapat kegiatan dalam mendukung pengembangan desa siaga yaitu:

Tabel 13 Data UKBM dalam mendukung pengembangan desa Siaga

No	Jenis kegiatan	2016	2017
1.	Posyandu Balita	Ada	Ada
2.	Posyandu Lansia	Ada	Ada
3.	Posyandu Remaja	Ada	Ada
4.	Kelas Ibu Hamil	Ada	Ada
5.	Kelas Balita	Ada	Ada
6.	KP ASI	Ada	Ada
7.	Pos Gizi	Ada	Ada
8.	Taman Posyandu	Ada	Ada

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh Tahun 2017

Kegiatan UKBM tersebut mendukung pengembangan desa siaga. Ada 8 kegiatan, yang telah dilaksanakan sesuai jadwal dan rencana kerja. Saat ini pengembangan desa siaga aktif masih terus dilaksanakan. Berikut kondisi pengembangan desa siaga aktif:

Tabel 14 Kondisi pengembangan Desa Siaga Aktif

Kriteria	Keterangan	
	2016	2017
Forum masyarakat	Berjalan setiap bulan	Berjalan setiap bulan
Kader Kesehatan	10 orang	10 orang
Pelayanan Kesehatan Dasar	Mudah mengakses pelayanan	Mudah mengakses pelayanan
UKBM	Posyandu aktif dan 7 UKBM lainnya jg aktif	Posyandu aktif dan 7 UKBM lainnya jg aktif
PSM dan Ormas	Dukungan dana dari Pemerintah dan swadaya masyarakat	Dukungan dana dari Pemerintah dan swadaya masyarakat
Perdes, Perbub	Sudah terealisasi	Sudah terealisasi
PHBS	Pembinaan dan survey PHBS, hasil 37 %	Pembinaan dan survey PHBS, hasil 56 %

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh Tahun 2017

Dari beberapa kriteria tersebut diatas, menunjukkan data bahwa desa Kedungrejo masuk dalam tahapan desa siaga aktif purnama.

4) Pemandirian masyarakat

Pemandirian masyarakat di Desa Kedungrejo dalam program terpadu P2WKSS dilakukan dengan cara memberikan pembinaan kepada masyarakat sampai masyarakat dirasa mampu untuk berdiri sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Haris selaku kepala seksi peningkatan kualitas hidup perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

“Jadi, setiap kader maupun petugas pelaksana yang ada di desa binaan P2WKSS memang awalnya harus ada pendampingan nanti mereka kita berikan pembinaan sehingga mereka bisa mandiri.” (wawancara tanggal 05 Januari 2018, pukul 10.06 WIB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang)

Selain pendampingan, masyarakat Desa Kedungrejo juga diberikan sosialisasi, pelatihan, dan bantuan-bantuan yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat sehingga mereka bisa mandiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Iza selaku warga binaan P2WKSS di Desa Kedungrejo bahwa:

“Pemandiriannya ya melalui pembinaan itu, bantuan-bantuan juga seperti alat2 APE, PMT, bantuan dana operasional yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat” (wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.49 WIB di Rumah Bu Iza)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bu Suyati selaku warga binaan P2WKSS di Desa Kedungrejo bahwa:

“mulai dari pembinaan, pelatihan-pelatihan, sosialisasi itu lalu dikembangkan sehingga masyarakat sudah bisa produktif dan bisa untuk mandiri” (wawancara pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 10.09 WIB di Musholla Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang)

b. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Program P2WKSS di Desa Kedungrejo

Pelaksanaan program P2WKSS di Desa Kedungrejo tidak terlepas dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Suyati selaku warga binaan P2WKSS di Desa Kedungrejo bahwa:

“aktor-aktor ya banyak mbak, ada 13 komponen itu tadi. Ada dinas Perindustrian, Dinas PPPA, Dinas Peternakan, ada PKK juga” (wawancara pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 10.09 WIB di Musholla Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang)

Aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu Tim Pelaksana dan didukung dengan mitra kerja yang membantu dalam terselenggaranya kegiatan ini. Adapun susunan tim pelaksana dalam program P2WKSS di Desa Kedungrejo, sebagai berikut:

Tabel 15 Daftar Tim Pembina P2WKSS Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Desa

No	Kelompok P2WKSS	Koordinasi Kegiatan Dengan TP P2WKSS		
		Tim Pembina Kabupaten	Tim Pembina Kecamatan	Tim Pelaksana Desa/Aparatur Kerja
1.	Keagamaan	- Kemenag - Bag. Adm. Kesra	KUA	Kaur Kesra
2.	Hukum	- Bag. Hukum - Kantor Kementrian Agama - Pokja I TP. PKK	- Pokja I TP. PKK - KUA	- Pokja I TP. PKK Desa - Tokoh Agama - Tokoh masyarakat sesuai materi yang akan disampaikan
3.	Kesehatan	- Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdaya	- Puskesmas - Pokja IV TP. PKK	- Pokja IV TP. PKK Desa - Bidan Desa - Kader

		an Masy. Dan Desa - Pokja IV TP.PKK		Posyandu
4.	Pendidikan	- Dinas Pendidikan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Pokja II TP. PKK	- UPTD Pendidikan - Pokja II TP. PKK	- Pokja II TP. PKK Desa - Koordinator kegiatan PAUD
5.	Perindustrian dan Perdagangan	- Dinas Perindustrian - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - Pokja II TP. PKK	Pokja II TP. PKK	- Pokja II TP. PKK Desa - Ketua KUB - Wirausaha perempuan
6.	Kominfo	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Kemenag - Pokja I TP. PKK	- Kantor KUA - Seksi Humas - Pokja I TP. PKK	- Pokja I TP. PKK - Petugas taman bacaan - Tokoh agama - Tokoh masyarakat sesuai materi yang akan disampaikan
7.	Koperasi & UKM	- Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro - Pokja II TP. PKK	Pokja II TP. PKK	- Pokja II TP. PKK Desa - Pengurus Kopwan
8.	Sosial	- Dinas Sosial - Pokja I TP. PKK	Sosbud Kecamatan	- Perangkat Desa - Pokja I TP. PKK Desa - Pokja IV TP. PKK
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap	- Dinas PPPA - Pokja I TP. PKK	- Sosbud Kec. - TP. PKK	TP PKK Desa

	Perempuan dan Anak			
10.	Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian - Dinas Peternakan - Dinas Perikanan - Dinas Ketahanan Pangan - Pokja III TP. PKK 	<ul style="list-style-type: none"> -PPL Pertanian -Pokja III TP. PKK 	<ul style="list-style-type: none"> - Pokja III TP. PKK - Kelompok tani wanita
11.	PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Penggerak PKK - Anggota Tim terkait 	Tim Penggerak PKK	Tim Penggerak PKK
12.	Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> - P4GN Kabupaten Jombang - Kesbangpol Jombang 		Pokja I TP. PKK
13.	Kependudukan dan KB	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PP dan KB - Pokja IV TP. PKK 	<ul style="list-style-type: none"> -PLKLB -Pokja IV TP. PKK 	<ul style="list-style-type: none"> - Pokja IV TP. PKK - Bidan Desa - Kader Posyandu - PPKBD - Sub PPKBD

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan program P2WKSS bukan hanya dilakukan oleh tim pelaksana saja namun juga dibantu oleh kader-kader P2WKSS Desa Kedungrejo yang telah dibentuk pada awal pembinaan P2WKSS di Desa Kedungrejo. Kader-kader tersebut berasal dari masyarakat Desa Kedungrejo sendiri seperti yang diungkapkan oleh Pak Haris selaku

kepala seksi peningkatan kualitas hidup perempuan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yakni:

“kadernya berasal dari masyarakat desa sendiri. Kader pelaksana itu mereka yang mempunyai komitmen untuk bekerja membangun desanya itu, mempunyai tanggungjawab dan kemauan. Kalau merekanya gak mau dipaksa ya malah gak jadi kan pas sudah seperti itu nanti kan banyak administrasi yang harus dikerjakan.” (wawancara tanggal 05 Januari 2018, pukul 10.06 WIB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang)

Dibentuknya kader yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri dimaksudkan supaya setelah pembinaan selesai kegiatan-kegiatan untuk membangun desanya sendiri masih terus berlanjut. Berikut adalah nama-nama kader binaan P2WKSS yakni:

Tabel 16 Nama-nama Kader Binaan Program P2WKSS di Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang

NO	KOMPONEN/ NAMA KADER	JABATAN
1.	Sektor Agama a. Sholehah b. Widayah c. Zaziah	Ketua Kelompok Sekretaris Bendahara
2.	Sektor Hukum a. Jumar Puji b. Titin Apriliyani c. Ika Rifa	Ketua Kelompok Sekretaris Bendahara
3.	Sektor Kesehatan a. Suyuti b. Tutuk Herni P. c. Arpiyah	Ketua Kelompok Sekretaris Bendahara
4.	Sektor Pendidikan a. Nur Hidayah b. Sri Wahyuni c. Linda	Ketua Kelompok Sekretaris Bendahara
5.	Sektor Perindustrian dan Perdagangan a. Rofiyanti b. Fujiyah c. Sundari	Ketua Kelompok Sekretaris Bendahara
6.	Sektor Kominfo a. Lusi	Ketua Kelompok

	b. Dani c. Nurul	Sekretaris Bendahara
7.	Sektor Koperasi dan UKM a. Lilik Nur Hidayati b. Dwifani c. Eko Sulistyowati	Ketua Kelompok Sekretaris Bendahara
8.	Sektor Sosial a. Karsini b. Julaikah c. Sustyoningsih	Ketua Kelompok Sekretaris Bendahara
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Sumiati b. Muamarah c. Jariyah	Ketua Kelompok Sekretaris Bendahara
10.	Sektor Ketahanan Pangan a. Sudarwati b. Sumiati	Ketua Kelompok Sekretaris
11.	Sektor PKK a. Nur Faizah	Ketua Kelompok
12.	Sektor Narkoba a. Solikhatin b. Fitriya	Ketua Kelompok Sekretaris
13.	Sektor Kependudukan dan KB a. BKB. Ari Lambang b. PPKBD. Eny Lusi M c. BKR. Fitriyah d. KRR. Am Titis Candra e. BKL. Istatik	Ketua Kelompok Sekretaris Bendahara Anggota Anggota

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang

Dalam pelaksanaan program P2WKSS di Desa Kedungrejo masih belum ada sektor swasta yang terlibat. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Haris selaku kepala seksi peningkatan kualitas hidup perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

“untuk kerjasama dengan pihak swasta masih belum ada, kedepannya harapannya bisa ada kerjasama dengan sektor swasta” (wawancara tanggal 05 Januari 2018, pukul 10.06 WIB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang)

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Pelaksanaan pemberdayaan tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung yang ada di dalamnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung berjalannya pemberdayaan karena pemberdayaan tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor pendukung yang ada di dalamnya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Haris selaku Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang yang mengatakan bahwa:

“Faktor pendukungnya itu perangkat kecamatan, perangkat desa, kemudian sarana prasarana yang ada di desa seperti ada balai desa, posyandu, taman posyandu, pelayanan publik desa, poskesdes, tempat-tempat untuk menyediakan kegiatan rapat. Partipasi masyarakat Desa Kedungrejo untuk datang, selalu datang. Rata-rata desa mendukung program P2WKSS, masyarakat desa sangat antusias, kan senang dibina” (wawancara tanggal 05 Januari 2018, pukul 10.06 WIB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang)

Disisi lain, Pak Nurudin selaku Ketua Pelaksana Program P2WKSS di Desa Kedungrejo sekaligus Kepala Desa Kedungrejo mengungkapkan bahwa:

“Faktor pendukung kebetulan disini terdapat potensi desa seperti kegiatan perempuan seperti poskesdes dan posyandu, kemudian juga sumberdaya manusianya yang dijadikan sasaran binaan.” (wawancara pada tanggal 16 Januari 2018, pukul 10.22 WIB di Kantor Kepala Desa Kedungrejo)

Selaras dengan yang dikemukakan Pak Nurudin, bu Suyati selaku warga binaan P2WKSS di Desa Kedungrejo mengungkapkan bahwa:

“kadernya mendukung, masyarakatnya mendukung, perangkatnya mendukung, semuanya mendukung” (wawancara pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 10.09 WIB di Musholla Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang)

Selain itu, Bu Iza selaku warga binaan P2WKSS di Desa Kedungrejo yang mengungkapkan bahwa:

“faktor pendukungnya ya banyaknya bantuan-bantuan dari dinas, seperti bantuan dana untuk posyandu, bantuan PMT dan alat-alat APE”. (wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.49 di Rumah Bu Iza)

b. Faktor Penghambat

Pada pembedayaan selain adanya faktor pendukung tentunya juga terdapat faktor penghambat. Faktor penghambat program P2WKSS di Desa Kedungrejo diungkapkan oleh Bapak Haris selaku Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang yang mengatakan bahwa:

“Masalah yang dihadapi kader yaitu masalah administrasi karena mereka terbentur dengan waktu mereka, terbentur dengan kegiatan mereka di pertanian sehingga mereka harus membagi waktu bagaimana mereka harus bekerja disawah dan harus membuat catatan administrasinya, itu merupakan salah satu kendala. Yang kedua masalah dari SDM dari masyarakat desa itu sendiri. Mungkin latar belakang dari kader terbatas sehingga tidak menuntut kemungkinan dengan keterbatasan SDM itu tentunya akan mempengaruhi tingkat penyerapan atau pemahaman mereka terhadap materi-materi pembinaan oleh SKPD terkait.” (wawancara tanggal 05 Januari 2018, pukul 10.06 WIB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang)

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Pak Haris, Pak Nurudin selaku Ketua Pelaksana Program P2WKSS di Desa Kedungrejo sekaligus Kepala Desa Kedungrejo juga mengungkapkan bahwa:

“Penghambatnya kembali pada masalah SDM, walaupun disini dianggap sudah mampu, sudah berjalan tapi dalam kelas mengikuti lomba masih perlu penyesuaian lagi peningkatan SDMnya terutama untuk pelaksanaannya justru dengan adanya program-program baru kemudian orang-orang didesanya kan masih orang-orang awam sehingga untuk mengarah pada aturan-aturan baru itu terkadang agak

bingung menyesuaikan lagi.” (wawancara pada tanggal 16 Januari 2018, pukul 10.22 WIB di Kantor Kepala Desa Kedungrejo)

Begitu juga menurut Bu Iza selaku warga binaan P2WKSS di Desa

Kedungrejo yang mengungkapkan bahwa:

“Pembinaannya belum faham betul, pembinaannya satu tahun di jadwal empat kali sedangkan kita juga masih kayak murid gitu ya kalau di motivasi gini-gini tetap jalan dikasih jarak berapa lama, yang namanya orang, banyak juga ya sektornya”. (wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.49 di Rumah Bu Iza)

Selain itu, dalam pelaksanaan program P2WKSS di Desa Kedungrejo masih belum ada sektor swasta yang terlibat. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Haris selaku kepala seksi peningkatan kualitas hidup perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

“untuk kerjasama dengan pihak swasta masih belum ada, kedepannya harapannya bisa ada kerjasama dengan sektor swasta” (wawancara tanggal 05 Januari 2018, pukul 10.06 WIB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang)

C. Analisis Data

1. Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) Di Desa Kedungrejo, Kabupaten Jombang

a. Tahap-Tahap Pemberdayaan perempuan melalui program P2WKSS di Desa Kedungrejo ditinjau dari Sektor Kesehatan

Pemberdayaan dapat berjalan dengan melakukan serangkaian macam tahapan-tahapan. Menurut Tim Delivery (2004) dalam Mardikanto dan Soebianto (2015:125) beberapa tahapan-tahapan dalam pemberdayaan meliputi:

1) Seleksi lokasi/wilayah

Tahap pertama dalam pemberdayaan perempuan melalui program P2WKSS yakni seleksi lokasi yang akan dijadikan sasaran pembinaan. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2015:125) Seleksi lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Kriteria pada program P2WKSS yaitu desa miskin atau desa merah yang dirasa kurang atau minus dalam pendidikannya, kesehatannya, lingkungan hidupnya, pengelolaan dalam sumber daya manusianya khususnya dalam peranan wanitanya. Penetapan kriteria ini penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan. Tujuan tersebut yakni meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera.

Berdasarkan kriteria tersebut maka akan didapat beberapa desa yang memenuhi kriteria. Untuk menseleksi lokasi/wilayah mana yang akan dijadikan sasaran desa binaan diantara desa-desa yang masuk dalam kategori desa merah di Kabupaten Jombang, Dinas melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari tiap kecamatan di seluruh Kabupaten Jombang. Melalui rapat koordinasi tersebut membahas mengenai penentuan desa yang akan dibina dalam program P2WKSS, evaluasi, program-program, dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Pada rapat tersebut seluruh kecamatan menunjuk Desa Kedungrejo sehingga berdasarkan kesepakatan pihak-pihak tersebut desa yang dipilih untuk menjadi desa sasaran program P2WKSS pada tahun 2017 yaitu Desa Kedungrejo, Kabupaten Megaluh. Desa tersebut dipilih karena pada sektor kesehatan Desa Kedungrejo telah memiliki berbagai fasilitas kesehatan seperti Polides, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, dan Posyandu Remaja namun dalam pengelolaan fasilitas kesehatan tersebut masih minim. Terpilihnya Desa Kedungrejo tersebut sebagai desa sasaran program P2WKSS mendapat dukungan dari perangkat desa, aparat, dan masyarakat setempat.

Setelah lokasi sasaran telah ditetapkan baru dilakukan koordinasi pembuatan SK dari Kabupaten mengenai Tim Pengelolaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera. Dalam SK tersebut berisi tentang nama-nama perwakilan dari dinas-dinas terkait yang terlibat dalam pengelolaan program peningkatan

terpadu peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera yang kemudian ditindak lanjuti oleh Kecamatan untuk membuat SK lagi yang berisi tim pembina, tim pelaksana, dan tim pengelola. Pada SK tersebut perwakilan dari dinas-dinas tersebut dibagi menjadi beberapa tim untuk melaksanakan program di Desa Kedungrejo. Dari Kecamatan kemudian dilanjutkan lagi pembuatan SK dari desa lokasi binaan yaitu Desa Kedungrejo. SK yang dibuat oleh Desa Kedungrejo berisi nama-nama kader binaan program terpadu P2WKSS yang berasal dari warga Desa Kedungrejo. Kader binaan di bagi menjadi beberapa tim sesuai dengan sektor masing-masing.

2) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Tahap ini merupakan tahap yang berjalan setelah lokasi binaan P2WKSS telah ditetapkan melalui rapat koordinasi. Pada tahap ini sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Kedungrejo pada tanggal 20 Februari 2017 dengan mengundang sekitar 80 orang yang terdiri dari istri Bupati Jombang yakni Bu Catur, unsur perangkat desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, RT, RW, serta Tim Penggerak P2WKSS yang salah satunya yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan aktor paling penting dan berpengaruh terhadap program P2WKSS di Kabupaten Jombang karena aktor tersebut adalah pelaksana utama P2WKSS.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2015:125) sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengkomunikasikan kegiatan program P2WKSS melalui sosialisasi yang menghadirkan pihak-pihak terkait sehingga akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan dan pihak-pihak terkait dapat memahami tugas masing-masing. Pada sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai pedoman umum pelaksanaan P2WKSS, komponen-komponen yang ada di P2WKSS dan mereka juga diberikan buku pedoman umum pelaksanaan P2WKSS sehingga mereka lebih memahami apa itu program P2WKSS. Masyarakat juga dapat berinteraksi dengan pemerintah, dapat memberikan saran mengenai apa yang mereka butuhkan dan yang mereka inginkan, kendala-kendala yang mereka hadapi selama ini. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan World Bank (2001) dalam Mardikanto dan Sobianto (2015:28) bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Adanya sosialisasi pedoman umum pelaksanaan P2KWSS diharapkan masyarakat dapat mengetahui tujuan dari program

ini sehingga pemberdayaan bisa terlaksana dengan baik dan tentunya dapat membuat Desa menjadi lebih baik lagi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi pedoman umum P2WKSS di Desa Kedungrejo tersebut telah berjalan dengan lancar. Semua aktor yang terlibat dalam program P2WKSS datang dalam sosialisasi tersebut. Hal tersebut menunjukkan antusiasme dari semua aktor yang terlibat dalam program P2WKSS, khususnya masyarakat Desa Kedungrejo.

3) Proses pemberdayaan masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto (2015:125) terdiri dari beberapa hal. Pertama, mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Desa Kedungrejo memiliki beberapa potensi yakni fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia. Fasilitas kesehatan yang ada seperti 1 Polides, 3 Posyandu Balita, 2 Posyandu Lansia, dan 1 Posyandu Remaja yang belum terkelola dengan baik. Padahal adanya fasilitas-fasilitas tersebut bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mengelola fasilitas tersebut tentunya membutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia potensial yang ada di Desa Kedungrejo yakni perempuan-perempuan Desa Kedungrejo yang belum termanfaatkan secara maksimal. Perempuan Desa Kedungrejo merupakan sumber daya potensial karena di Desa Kedungrejo banyak ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dan memiliki banyak waktu

senggang sehingga apabila ibu-ibu rumah tangga tersebut dimanfaatkan dengan baik maka perempuan tersebut bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Berdasarkan potensi dan permasalahan tersebut melalui program P2WKSS potensi-potensi tersebut dimanfaatkan sehingga nantinya bisa mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri. Hal tersebut menurut Nugroho (2008:164) bertujuan untuk Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Kedua, menyusun rencana kegiatan kelompok. Sebelum menyusun rencana kegiatan kelompok, dibentuk susunan kader P2WKSS yang ditunjuk sebagai koordinator masing-masing sektor yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Kader P2WKSS diambil dari masyarakat Desa Kedungrejo sendiri yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan program P2WKSS di Desa Kedungrejo. Setelah dibentuk kader P2WKSS maka akan lebih jelas tugas masing-masing kader dalam membantu sektor-sektor terkait. Dalam program P2WKSS di Desa Kedungrejo terdapat 13 sektor yang terdiri dari sektor keagamaan, hukum, kesehatan, pendidikan, perindustrian dan perdagangan, kominfo, koperasi & UKM, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, ketahanan pangan, PKK, narkoba, kependudukan dan KB. Pembinaan tersebut dilakukan langsung ke kader-kadernya dan kader-kader tersebut langsung menerapkan ke sektornya. Dalam penerapannya

terdapat rencana kegiatan kelompok pemberdayaan dalam program P2WKSS dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, pelatihan, dan pembinaan kepada ibu-ibu.

Ketiga, menerapkan rencana kegiatan kelompok. Kelompok-kelompok kader yang telah dibentuk tersebut menerapkan rencana kegiatan yang telah disusun berdasarkan sektor-sektor yang telah ditetapkan dan dibagi pada masing-masing kader. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan didampingi oleh tim penggerak P2WKSS serta mendatangkan tenaga ahli pada masing-masing sektor dan PKK. Pelaksanaan kegiatan P2WKSS pada sektor kesehatan dilakukan pembinaan kepada kader binaan mengenai kegiatan pengelolaan posyandu. Kegiatan di posyandu diupayakan untuk mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan di setiap posyandu adalah sebagai berikut: masyarakat melakukan pendaftaran dengan membawa KMS pada meja 1 setelah itu menuju ke meja 2 penimbangan badan dan ukur tubuh, setelah itu baru ke meja 3 diadakan pencatatan oleh kader posyandu. Pencatatan dilakukan menggunakan format sistem informasi posyandu (SIP) atau sistem informasi manajemen (SIM) yang terdiri dari buku register keahlian atau kematian bayi, bumil, ibu melahirkan dan ibu nifas. Buku register PUS dan WUS. Buku register bayi dan balita yang mencatat jumlah keseluruhan bayi dan balita di wilayah posyandu. Buku catatan kegiatan usaha, buku kegiatan pertemuan, buku pengelolaan keuangan dan kegiatan penunjang lainnya.

Kemudian ke meja 4 yaitu penyuluhan, penyuluhan yang diberikan tergantung oleh masyarakat yang diberikan pelayanan. Misalnya untuk kesehatan ibu dan anak diberikan penyuluhan mengenai IMD dan ASI Eksklusif yang dilakukan 12 kali per tahun. Penyuluhan tersebut tidak hanya diadakan di Posyandu namun juga diadakan pada pertemuan KP-ASI dan Kelas Ibu Hamil. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu tentang pentingnya ASI Eksklusif, bagaimana memenuhi gizi anak supaya tidak gizi buruk, serta pengetahuan seputar kehamilan. Hasil dari pelayanan kesehatan dan penyuluhan tersebut, jumlah ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya ke petugas kesehatan meningkat, jumlah balita yang ditimbang melampaui target yaitu 100%, jumlah balita yang naik timbangannya juga melampaui target yakni 80,6%, bayi yang mendapat ASI Eksklusif meningkat dari 81,1% menjadi 87,9%

Kemudian, juga tersedia pelayanan kesehatan remaja. Untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan remaja, di Desa Kedungrejo telah tersedia Posyandu Remaja. Kegiatan posyandu remaja merupakan salah satu kegiatan upaya kesehatan berbasis remaja yang dilakukan untuk memantau kesehatan remaja dengan melibatkan remaja itu sendiri. Tak hanya itu, posyandu remaja juga merupakan tempat untuk pemberian informasi kesehatan maupun informasi penting lainnya kepada remaja secara rutin setiap bulannya. Intinya kegiatan posyandu remaja ini adalah untuk memperdayakan dan melibatkan remaja dalam menjaga

kesehatannya dan merencanakan kehidupannya dimasa yang akan datang. Sehingga kondisi kesehatan dan pertumbuhannya tetap terpantau setiap bulannya.

Selain itu, juga terdapat pelayanan kesehatan lansia. Untuk mendukung pelayanan kesehatan lansia, Desa Kedungrejo memfasilitasi dengan adanya Posyandu Lansia. Di Desa Kedungrejo Posyandu lansia ada 2, yaitu Posyandu di dusun Bungkil dan Posyandu di dusun Kedung. Kegiatan yang sudah dilaksanakan di Posyandu Lansia antara lain dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan, senam lansia, tensi, imunisasi Depteri, pemberian kapsul tambah darah, pemberian makanan tambahan. Senam lansia dilakukan setiap pagi sebelum pemeriksaan kesehatan lansia untuk meningkatkan kebugaran jasmani lansia. Lansia juga diberikan makanan tambahan untuk penambahan gizi lansia. Makanan tambahan untuk lansia tersebut berasal dari bantuan pemerintah. Partisipasi lansia dalam program pemberdayaan di Desa Kedungrejo sangat baik. Adanya pelayanan kesehatan lansia tersebut, meningkatkan kesehatan lansia dan gizi lansia. Hal tersebut secara tidak langsung mewujudkan misi pembangunan pemberdayaan perempuan yaitu melaksanakan 5 Agenda Pokok Nasional yang dikutip dalam buku Mengukir Paradigma Menembus Tradisi (Parawansa, 2006:73-74) yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang kesehatan perempuan, anak, remaja, dan perempuan lanjut usia.

Pada program terpadu P2WKSS ini masyarakat juga diberikan sosialisasi mengenai PMT yang baik dan cara penanggulangan gizi buruk. Untuk penanggulangan gizi buruk, masyarakat Desa Kedungrejo telah melakukan berbagai kegiatan seperti pemberian taburin, survey garam beryodium, pemberian vitamin A, penyuluhan gizi, taman pemulihan gizi, pemberian mineral mix, dan pemberian PMT yang rutin dilakukan setiap tahunnya sesuai rencana kerja. Selain kegiatan tersebut juga terdapat kegiatan dalam mendukung pengembangan desa siaga yaitu posyandu lansia, posyandu remaja, kelas ibu hamil, kelas balita, KP ASI, Pos gizi, taman posyandu. Kondisi pengembangan desa aktif sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dan telah masuk dalam tahapan desa aktif purnama. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pemberdayaan pada sektor kesehatan dikatakan berhasil.

Keempat, Memantau proses hasil kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun perbaikan kalau diperlukan (Tim Delivery: 2004). Pada program P2WKSS di Desa Kedungrejo, masyarakat sendiri yang melakukan pemantauan atau evaluasi sehingga mereka dapat mengetahui hasil dari adanya pemberdayaan serta mengetahui saja yang kurang dan perlu di

perbaiki. Setelah masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi, kemudian membuat laporan rutin hasil pemberdayaan program P2WKSS di Desa Kedungrejo yang diserahkan ke kecamatan pada saat rapat evaluasi. Melalui rapat evaluasi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ikut memantau perkembangan masyarakat Desa Kedungrejo. Monitoring dan evaluasi pada program P2WKSS di Desa Kedungrejo bersifat *bottom-up*.

4) Pemandirian masyarakat

Berpegang dalam prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya (Mardikanto & Soebianto 2015:127). Di Desa Kedungrejo sendiri telah terbentuk kegiatan posyandu balita, posyandu remaja, dan posyandu lansia. Upaya pemerintah dalam memandirikan masyarakatnya yaitu dengan memberikan pendampingan dan sosialisasi seputar kesehatan kepada masyarakat. Pada pendampingan mereka diajarkan bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan benar, bagaimana memenuhi gizi masyarakat, dan bagaimana penanggulangan gizi buruk sehingga masyarakat dapat terhindar dari gizi buruk. Selain itu, Desa Kedungrejo juga diberikan bantuan-bantuan dana, alat-alat permainan edukatif dan PMT dari pemerintah. Bantuan-bantuan tersebut diberikan supaya masyarakat Desa Kedungrejo dapat mandiri dengan

mengolah dan mengembangkan fasilitas atau kegiatan mereka sendiri sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sumodiningrat dalam Mardikanto dan Soebianto (2015) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi yang mereka miliki.

b. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Program P2WKSS di Desa Kedungrejo

Pada pelaksanaan program P2WKSS di Desa Kedungrejo tentunya terdapat aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan. Aktor-aktor tersebut menurut Sulastiyani (2014:97) antara lain:

1) Pemerintah

Menurut Sulistiyani (2014:97) salah satu aktor dalam pemberdayaan yaitu Pemerintah. Dimana pemerintah memiliki peran yakni formulasi dan penetapan kebijakan, implementasi, monitoring, dan evaluasi serta mediasi. Bentuk output perannya itu sendiri adalah berbagai macam kebijakan dan penanggulangan kemiskinan, penetapan indikator, pembuatan juklak, penyelesaian sengketa. Pemerintah dalam program P2WKSS di Desa Kedungrejo yakni berperan sebagai Tim Pembina P2WKSS. Tim Pembina dalam program P2WKSS di Desa Kedungrejo terdiri dari tiga tim yakni tim pembina kabupaten, tim pembina kecamatan, dan tim pelaksana desa/aparatur kerja yang saling terkoordinasi. Tim pembina program P2WKSS terbagi menjadi 13 sektor

yakni keagamaan, hukum, kesehatan, pendidikan, perindustrian dan perdagangan, kominfo, koperasi & UKM, sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, ketahanan pangan, PKK, narkoba, kependudukan dan KB. Aktor yang paling penting dan berpengaruh terhadap program P2WKSS yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang karena aktor tersebut adalah pelaksana utama program P2WKSS. Namun, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga dibantu oleh dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan program P2WKSS di Desa Kedungrejo.

Peran pemerintah disini yaitu menentukan lokasi sasaran pembinaan program P2WKSS, membina, memonitoring, serta mengevaluasi. Pada penentuan lokasi pihak pemerintah melakukan rapat koordinasi dan hasilnya pada Tahun 2017 desa yang dipilih yaitu Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, terpilihnya desa tersebut karena telah memenuhi indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah ditetapkan maka pemerintah melakukan pembinaan, pembinaan tersebut berupa penyuluhan, pelatihan serta bantuan-bantuan. Ketika pihak dinas telah melakukan pembinaan maka tugas pemerintah yakni melakukan monitoring apakah kegiatan-kegiatan dalam pembinaan berjalan dengan baik. Setelah itu Pemerintah melakukan evaluasi untuk melihat setelah ada program P2WKSS tersebut terjadi peningkatan atau tidak.

2) Swasta

Menurut Sulistiyani (2014:97) aktor lain selain pemerintah dalam pemberdayaan yakni swasta. Dimana swasta memiliki peran yakni kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Bentuk outputnya konsultasi & rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan pemeliharaan. Dalam pelaksanaan program P2WKSS di Desa Kedungrejo masih belum ada kerjasama dengan pihak swasta. Pelaksanaanya hanya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat saja. Namun kedepannya, pihak pemerintah berencana untuk bekerjasama dengan pihak swasta sehingga pelaksanaan pemberdayaan P2WKSS bisa semakin baik lagi.

3) Masyarakat

Menurut Sulistiyani (2014:97) selain pemerintah dan swasta juga terdapat aktor lain dalam pemberdayaan yaitu masyarakat. Masyarakat memiliki peran partisipasi dalam formulasi, implementasi, *monitoring* dan evaluasi. Sedangkan untuk bentuk outputnya saran, kritik, input, partisipasi, menghidupkan fungsi kontrol sosial, menjadi objek. Masyarakat dalam pemberdayaan program P2WKSS disini yakni masyarakat Desa Kedungrejo khususnya perempuannya yang menjadi sasaran program P2WKSS.

Pihak masyarakat yakni masyarakat Desa Kedungrejo sendiri berperan sebagai pelaksana program P2WKSS. Dalam pelaksanaannya dibentuk kader yang berasal dari masyarakat Desa Kedungrejo sendiri. Kader tersebut dibagi menjadi 13 sektor yang dibina oleh pembina

P2WKSS yaitu pemerintah. Setelah diberikan pembinaan, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program P2WKSS serta mengimplementasikan hasil pembinaan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk diterapkan di desanya sendiri. Menurut Nugroho (2008:164) hal tersebut bertujuan untuk Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan yang terjadi selama ini. Masyarakat juga melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat hasil capaian setelah dilaksanakan program P2WKSS. Hal tersebut juga mewujudkan tujuan pemberdayaan perempuan yang dikemukakan Nugroho (2008:164) yakni Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan melalui program P2WKSS di Desa Kedungrejo terdapat beberapa faktor pendukung yang menunjang berjalannya kegiatan-kegiatan tersebut yang terdiri dari:

1) Fasilitas, Sarana dan Prasarana

Fasilitas, sarana, dan prasarana merupakan penunjang dalam terlaksananya kegiatan program P2WKSS di Desa Kedungrejo seperti adanya balai desa yang digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi-sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat. Tak hanya itu saja, Desa Kedungrejo juga menyediakan tempat untuk kegiatan rapat mengenai P2WKSS. Pada sektor kesehatan juga sudah terdapat Poskesdes dan Posyandu. Hal tersebut tentunya sangat membantu dalam pelaksanaan program P2WKSS di Desa Kedungrejo karena adanya dukungan dari Kepala Desa maupun masyarakat dalam menyediakan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana dalam berlangsungnya program P2WKSS sehingga pelaksanaan pembinaan dan pelatihan dapat berjalan dengan lancar.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Desa Kedungrejo merupakan salah satu yang mendukung dalam pelaksanaan program P2WKSS. Masyarakat Desa Kedungrejo sangat antusias terhadap pembinaan program P2WKSS di Desa Kedungrejo. Mereka sangat senang diberikan pembinaan dan pelatihan, hal itu ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat Desa Kedungrejo yang selalu datang apabila diadakan pembinaan dan pelatihan. Adanya antusias partisipasi masyarakat Desa Kedungrejo terhadap program P2WKSS sangat berpengaruh terhadap pembinaan dan pelatihan sehingga dapat berjalan dengan baik.

3) Bantuan-bantuan dari Tim Pembina P2WKSS

Bantuan-bantuan dari Tim Pembina P2WKSS yaitu dinas-dinas terkait merupakan salah satu faktor pendukung. Dalam program P2WKSS, masyarakat Desa Kedungrejo banyak mendapatkan bantuan baik dana, tenaga ahli, alat-alat permainan edukatif serta PMT. Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan supaya bisa mandiri dalam mengelola fasilitas dan kegiatannya sendiri sehingga nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kedungrejo khususnya perempuannya.

b. Faktor Penghambat

1) Dana dan Waktu Pembinaan

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program P2WKSS di Desa Kedungrejo yaitu dana yang terbatas. Dana dalam pelaksanaan tersebut berasal dari APBDes Desa Kedungrejo. Karena terbatasnya APBDes Desa Kedungrejo maka menyebabkan pembinaan yang dilakukan di Desa Kedungrejo tidak berlangsung lama. Pembinaan hanya bisa dilakukan empat kali dalam satu tahun. Hal tersebut tentunya mengakibatkan pelaksanaan pemberdayaan di Desa Kedungrejo tidak dapat maksimal.

2) Sumber Daya Manusia

Meskipun sumber daya manusia di Desa Kedungrejo sangat antusias dalam program terpadu P2WKSS, namun kenyataan di lapangan kader P2WKSS di Desa Kedungrejo masih terbentur waktu sehingga dalam apabila ada pembinaan mereka datang terlambat. Mereka masih disibukkan dengan kegiatan mereka di pertanian dan mengurus keluarga.

Hal ini juga berpengaruh pada masalah administrasi sehingga dalam membuat catatan administrasinya terhambat. Selain karena terbentur waktu, sumber daya manusia di Desa Kedungrejo juga latar belakang pendidikannya masih rendah sehingga berpengaruh pada tingkat penyerapan dan pemahaman mereka terhadap materi-materi pembinaan oleh SKPD terkait. Warga yang dibina juga merasakan kesulitan dalam memahami dikarenakan banyaknya sektor dalam program P2WKSS yakni 13 sektor dan sedikitnya waktu dalam pembinaannya yang satu tahun dijadwalkan hanya empat kali pembinaan. Selain itu, masyarakat desa juga masih awam sehingga untuk mengarah ke aturan-aturan baru itu terkadang agak bingung menyesuaikan.

3) Belum Adanya Kerjasama dengan Pihak Swasta

Dalam pelaksanaan Program P2WKSS di Desa Kedungrejo masih belum ada kerjasama dengan pihak swasta. Aktor yang terlibat hanyalah pemerintah dan masyarakat saja. Hal ini tentunya mengakibatkan pelaksanaan pemberdayaan belum terlalu maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pemberdayaan Perempuan melalui Program P2WKSS, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pemberdayaan perempuan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui agar kegiatan berjalan dengan baik yaitu:
 - a. Pada tahap seleksi lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Pemilihan lokasi sasaran binaan P2WKSS sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yakni desa miskin/desa merah dan penetapan Desa Kedungrejo sebagai desa sasaran P2WKSS sudah disepakati oleh seluruh pihak terkait melalui rapat koordinasi.
 - b. Tahap sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Pihak dinas melakukan sosialisasi mengenai pedoman umum pelaksanaan P2WKSS dengan menghadirkan masyarakat dan pihak terkait.
 - c. Pada tahap proses pemberdayaan masyarakat diberikan pembinaan dan penyuluhan oleh Dinas terkait seperti penyuluhan PMT, ASI-Eksklusif, dan penanggulangan gizi buruk.
 - d. Pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri

kegiatannya. Kegiatan yang dilakukan untuk memandirikan masyarakat yaitu berupa pembinaan dan sosialisasi sehingga mereka mampu untuk mengelola sendiri.

2. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Program P2WKSS di Desa Kedungrejo

a. Pemerintah

Pemerintah dalam program P2WKSS di Desa Kedungrejo yakni berperan sebagai Tim Pembina P2WKSS. Peran pemerintah disini yaitu menentukan lokasi sasaran pembinaan program P2WKSS, membina, memonitoring, serta mengevaluasi.

b. Swasta

Dalam pelaksanaan program P2WKSS di Desa Kedungrejo masih belum ada kerjasama dengan pihak swasta.

c. Masyarakat

Pihak masyarakat yakni masyarakat Desa Kedungrejo sendiri berperan sebagai pelaksana program P2WKSS.

3. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kegiatan pemberdayaan yaitu:

a. Faktor pendukung dalam kegiatan pemberdayaan P2WKSS yaitu fasilitas, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan bantuan-bantuan dari tim pembina P2WKSS

b. Faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan P2WKSS yaitu dana dan waktu pembinaan, sumber daya manusia, dan belum adanya kerjasama dengan pihak swasta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran dalam Pemberdayaan Perempuan melalui Program P2WKSS di Desa Kedungrejo antara lain:

1. Sebaiknya pihak dinas menambah bantuan dana kepada masyarakat dan sebaiknya dana desa diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat sehingga pembinaan yang dilakukan bisa sering dilakukan sehingga masyarakat juga bisa lebih memahami tentang materi pembinaan P2WKSS.
2. Pihak dinas sebaiknya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat mengenai waktu pelatihan sehingga dapat ditentukan waktu yang tepat dan pembinaan P2WKSS dilakukan lebih sering agar masyarakat lebih memahami materi-materi pembinaan. Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai materi-materi pembinaan maka juga akan semakin baik juga pelaksanaan pembinaan sehingga hasil yang diberikan akan lebih maksimal.
3. Desa Kedungrejo sebaiknya dalam pemberdayaan bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal dana ataupun bantuan-bantuan sehingga pelaksanaan pemberdayaan akan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Bps.go.id

Buku Pedoman Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Hakim, EM. Lukman. 2016. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Jombangkab.bps.go.id

Jombangkab.go.id

Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/97/415.10.3.4/2017 tentang Tim Pengelolaan Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera

Laporan Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang Tahun 2017

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Miles, Matthew B, Huberman, A. Michael and Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook (ed.3th)*. London: Sage Publications.

Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya

Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender dan Pembangunan*. Diterjemahkan oleh Hartian Silawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengurusutamaanannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Parawansa, Khofifah Indar. 2006. *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Jender*. Jakarta: Pustaka LP3ES

Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera

- Soetrisno, Loekman.1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius
- Sugiyono.2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyan, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumaryadi, I, N. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Yansen. 2013. *Gerakan Desa Membangun: Sebuah Ide Inovatif Tentang Pembangunan Desa*. Malang: PT. Danar Wijaya

